

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016-2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN**

**JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 119 A TELP/FAX. (0343) 424614
PASURUAN**

DAFTAR ISI

Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tentang Penetapan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN	10
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	24
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Anggaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan 2011 – 2015	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	31

BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	34
3.1	Telaahan Terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	34
3.2	Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Pasuruan	35
3.3	Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi	40
3.4	Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pasuruan	48
3.5	Isu – isu Strategis	49
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	51
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	51
4.2	Strategis dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	60
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	63
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PASURUAN 2016-2021.....	97
BAB VII	PENUTUP.....	114

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan; (2) Penyusunan rancangan Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan; dan (4) penetapan Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan.

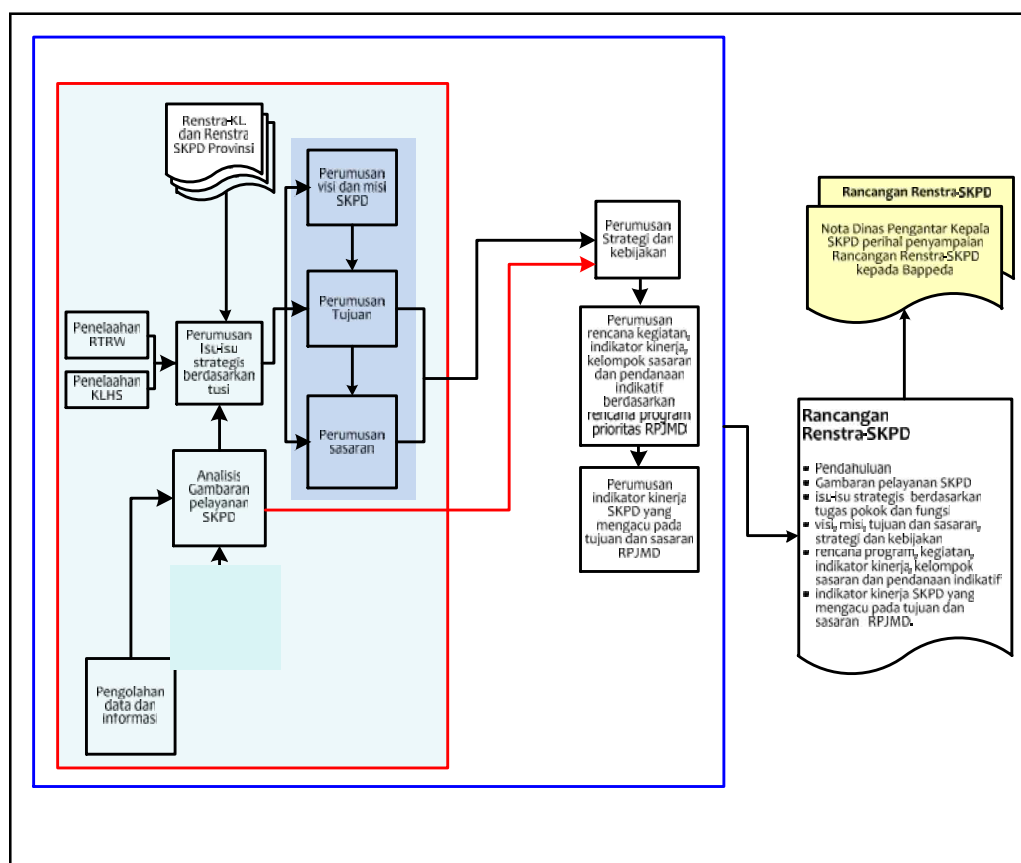
Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja DPPPAKB Kota Pasuruan diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra DPPPAKB Kota Pasuruan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kota Pasuruan, RPJMD Kota Pasuruan, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pasuruan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra DPPPAB Kota Pasuruan dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra DPPPAB Kota Pasuruan



Renstra DPPPAB Kota Pasuruan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra DPPPAB Kota Pasuruan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang disusun

setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra DPPAKB Kota Pasuruan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015-2020;
 29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
 30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
 31. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Pasuruan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pasuruan;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruantahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

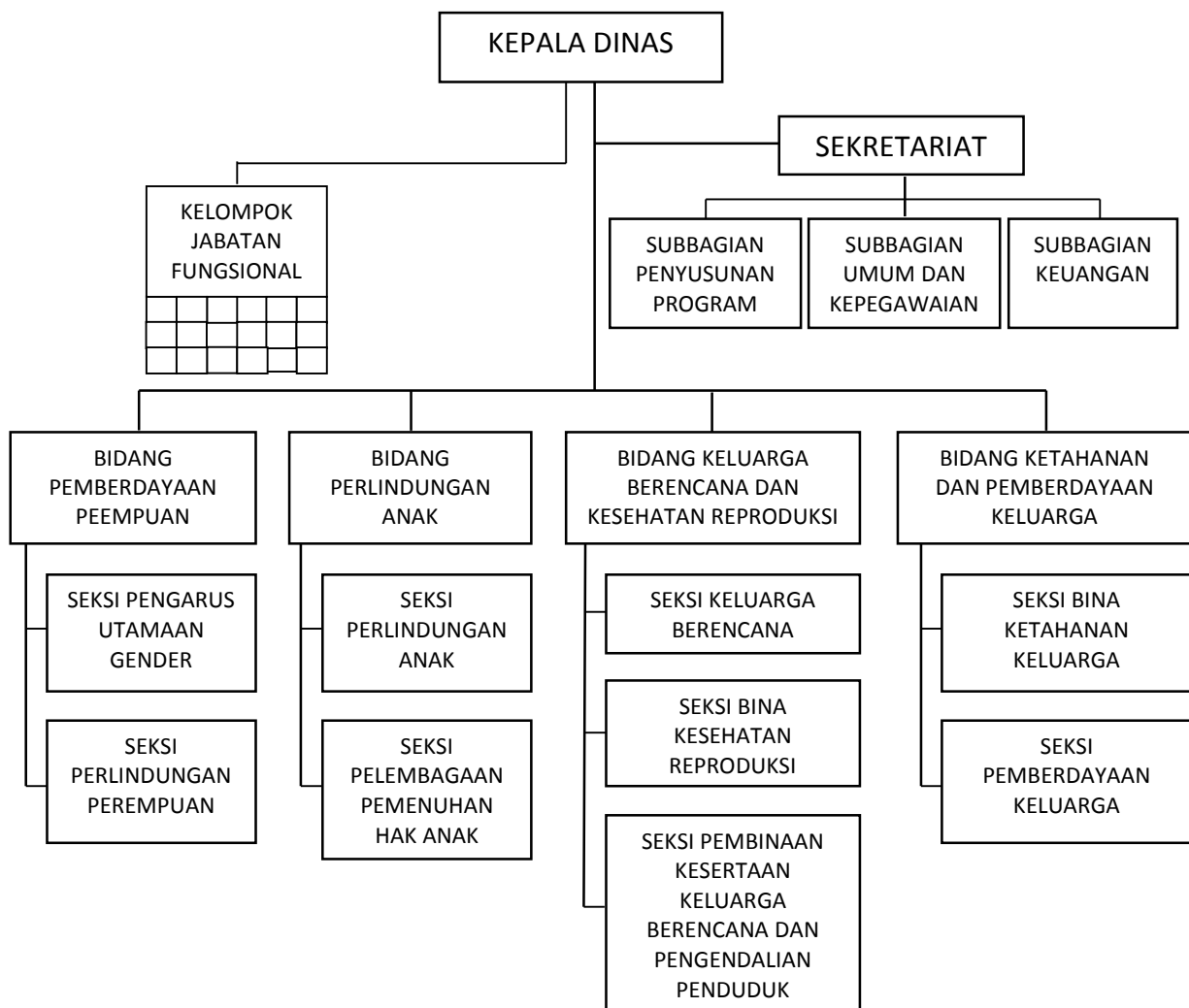
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Anak; dan
 2. Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 1. Seksi Keluarga Berencana;

2. Seksi Bina Kesehatan Reproduksi; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- f. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan

- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang sosial dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai 3 (tiga) Subbagian yaitu :

2.1 Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di luar pengadaan bangunan;
- e. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan layanan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di luar pengadaan bangunan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai 2 (dua) seksi yaitu :

3.1 Seksi Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender;
- c. menyiapkan bahan koordinasi agar program dan kebijakan lembaga pemerintahan daerah tidak bias gender;
- d. menyiapkan bahan dan pemberdayaan organisasi perempuan dalam rangka pengarusutamaan gender;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pengarusutamaan gender; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
- c. menyiapkan bahan dan pemberdayaan organisasi penyedia layanan perlindungan perempuan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan;
- e. menyiapkan bahan dan pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan perempuan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan anak;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelebagaan pemenuhan hak anak; dan

- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perlindungan anak.

Bidang Perlindungan Anak mempunyai 2 (dua) seksi yaitu :

4.1 Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait di bidang perlindungan anak;
- c. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian hak anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan *trafficking* terhadap anak;
- e. melaksanakan fasilitasi advokasi bagi anak yang mengalami tindak kekerasan;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan fasilitasi Pengarusutamaan Hak Anak;
- c. menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
- d. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai (tiga) seksi yaitu :

5.1 Seksi Keluarga Berencana , mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keluarga berencana;
- c. melaksanakan bahan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan keluarga berencana;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pemberian layanan keluarga berencana;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian jaminan pelayanan medis bagi peserta yang mengalami komplikasi dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;

- f. menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan mutu serta kualitas pelayanan keluarga berencana;
- g. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keluarga berencana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Bina Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bina kesehatan reproduksi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kesehatan reproduksi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi konseling kesehatan reproduksi oleh kelompok remaja;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bina kesehatan reproduksi;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan pembinaan pengendalian kependudukan dengan lembaga pendidikan dan lembaga/organisasi sosial;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka keikutsertaan keluarga berencana melalui media dan tatap muka;

- d. melaksanakan pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai 2 (dua)

Seksi yaitu :

6.1 Seksi Bina Ketahanan Keluargamempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan keluarga;
- c. menyiapkan bahan dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pola asuh keluarga;

- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi operasional dan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan dalam program Keluarga Berencana Nasional;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama Bina Ketahanan Keluarga dengan instansi/lembaga terkait;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Bina Ketahanan Keluarga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Seksi Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan keluarga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Suatu organisasi akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dengan diikuti proses *staffing*. Pada tahun 2015, jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sejumlah 60 orang. Komposisi kepegawaian menurut jenjang pendidikan dan golongan berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai DPPPAKB Kota Pasuruan Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2015

No.	Komposisi Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	Menurut Jenjang Pendidikan		
	- Sekolah Dasar	0	0
	- Sekolah Menengah Pertama	2	0
	- Sekolah Menengah Lanjutan Atas	7	5
	- Diploma 1	0	1
	- Diploma 2	0	0
	- Diploma 3	2	4
	- Sarjana	11	24
	- Pasca Sarjana	1	3
2	Menurut Golongan		
	- Golongan I	2	0
	- Golongan II	4	7
	- Golongan III	16	23
	- Golongan IV	1	7
	Jumlah	23	37

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPPPAKB Kota Pasuruan

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas diperlukan sumber daya non manusia antara lain prasarana dan sarana kerja yang memadai. Prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan diuraikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2**Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja DPPPAB Kota Pasuruan**

No.	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
1	Tanah Kantor	2009	1
2	Gedung dan Bangunan	2013	1
3	Gedung Gudang Alokon	2011	1
4	Meja Kerja	2009	22
5	Kursi Kerja	2008	21
6	Kursi Kerja	2009	12
7	Kursi Kerja	2011	39
8	Meja Rapat	2011	18
9	Kursi Rapat	2011	30
10	Komputer PC	2008	2
11	Komputer PC	2009	2
12	Komputer PC	2010	2
13	Komputer PC	2011	3
14	Komputer PC	2012	8
15	Komputer PC	2013	6
16	Komputer PC	2014	5
17	Printer	2008	1
18	Printer	2009	4
19	Printer	2010	2
20	Printer	2011	3
21	Printer	2012	9
22	Printer	2013	7
23	Printer	2014	5
24	Stabilizer	2012	3
25	Stabilizer	2014	16
26	Komputer Notebook (Laptop)	2009	1
27	Mesin Ketik	2008	5
28	Almari Kayu	2008	1
29	Almari Kayu	2009	1
30	Almari Kayu	2011	6
31	Almari Kayu	2014	5
32	Rak Buku	2011	6
33	Rak Obat	2012	17
34	Filling Kabinet	2008	6
35	Filling Kabinet	2009	6
36	Air Conditioner (AC)	2009	1
37	Air Conditioner (AC)	2012	10
38	Lemari Es	2008	2
39	Kipas Angin	2011	5
40	Exhaust Fan	2011	12
41	Faximili	2009	1
42	LCD Proyektor	2010	1

No.	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
43	Camera	2011	1
44	Pemadam Kebakaran	2011	2
45	Pompa Air	2011	1
46	Penampung Wadah Air	2011	1
47	Vacuum Cleaner	2012	1
48	Kereta Dorong	2012	2
49	Tangga Portabel	2012	2
50	Modem (Fixed Line/BroadBand)	2014	5
	Kendaraan Roda 4 :		
51	- Mobil Daihatsu Feroza	1994	1
52	- Mobil Penerangan	2009	1
53	- Mobil Toyota 1.3 G	2009	1
54	- Mobil Muyan KB	2010	1
55	- Kendaraan Akseptor Peserta KB / Isuzu NHR 55 CO E2-1 / Micro Bus	2014	1
	Kendaraan Roda 2 :		
56	- Honda Supra X Sporty	2008	40

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPPAKBKota Pasuruan

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun 2011 - 2015 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.3 menunjukkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun 2011 - 2015.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan 2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD ke-					Realisasi Capaian ke-					Rasio Capaian pada ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8 = 7 : 6)				
1	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	-	2.1	-	2.40	2.30	2.20	2.10	2.10	2.21	2.21	2.156	2.156	2.11	107.92	103.91	102.00	97.33	99.52
2	Unmetneed	5	-	-	10.00	9.00	8.00	7.00	10.00	10.13	10.44	10.20	8.44	8.75	98.70	84.00	72.50	79.43	112.50
3	Prevalensi KB (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	65	-	-	78.86	79.24	79.97	77.00	77.00	77.98	78.50	76.62	78.75	79.77	98.88	99.07	95.81	102.27	103.60
4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	-	21	-	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	20.87	20.87	22.98	23.79	23.29	104.35	104.35	109.43	108.14	105.86
5	Presentasi Peserta KB Aktif Pria	4.5	-	-	3.00	350.00	4.00	4.50	5.00	2.76	2.86	2.64	3.28	2.80	92.00	0.82	66.00	72.89	56.00
6	Jumlah Peserta KB Baru Wanita	-	-	-	5,380	5,649	5,931	3,997	2,679	4,616	4,658	4,067	3,749	4,083	85.80	82.46	68.57	93.80	152.41
7	Jumlah Peserta KB Baru Pria	-	2.7	-	195	20,400	214	748	114	535	350	926	397	342	274.36	1.72	432.71	53.07	300.00
8	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	-	92	-	96.40	96.45	96.50	90.00	87.00	95.05	89.98	89.63	88.71	92.21	98.60	93.29	92.88	98.57	105.99
9	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-	-	6	7	8	80	82	41	51	78	79	85	683.33	728.57	975.00	98.75	103.66
10	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	-	-	-	3	4	5	16	20	11	11	14	18	20	366.67	275.00	280.00	112.50	100.00
11	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	-	-	-	3	4	5	39	40	3	34	36	37	42	100.00	850.00	720.00	94.87	105.00
12	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja)	-	-	-	10	11	12	25	27	11	15	24	24	26	110.00	136.36	200.00	96.00	96.30
13	Jumlah Keluarga Aktif Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-	-	1,177	1,235	1,297	2,175	2,175	1,114	1,196	1,698	1,758	1,595	94.65	96.84	130.92	80.83	73.33
14	Jumlah Keluarga Aktif Bina Keluarga Remaja (BKR)	-	-	-	517	542	569	462	470	374	342	417	532	502	72.34	63.10	73.29	115.15	106.81
15	Jumlah Keluarga Aktif Bina Keluarga Lansia (BKL)	-	-	-	127	133	140	1,292	1,302	107	725	951	993	920	84.25	545.11	679.29	76.86	70.66
16	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) penerima Beras Miskin (Raskin)	-	-	-	-	-	-	9,437	9,437	9,009	11,311	9,437	9,437	9,437	-	-	-	100.00	100.00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD ke-					Realisasi Capaian ke-					Rasio Capaian pada ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8 = 7 : 6)				
17	Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	-	-	-	130	143	157	132	135	127	130	130	131	133	97.69	90.91	82.80	99.24	98.52
18	Jumlah kasus KDRT yang tertangani	-	-	-	14	12	10	20	6	24	16	22	12	31	171.43	133.33	220.00	60.00	516.67
19	Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
20	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	-	-	-	-	-	-	6.00	6.00	12.26	13.98	18.87	12.74	5.23	-	-	-	212.33	87.17
21	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	-	-	-	-	65.00	70.00	39.46	47.16	31.35	31.01	53.65	-	-	-	47.71	76.64

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa capaian Unmetneed, Prevalensi KB (CPR/Contraceptive Prevalence Rate), Median Usia Kawin Pertama Perempuan, Jumlah Peserta KB Baru Wanita, Jumlah Peserta KB Baru Pria, Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota UPPKS yang menjadi peserta KB, Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Jumlah Keluarga Aktif Bina Keluarga Remaja (BKR), Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) penerima Beras Miskin (Raskin), dan Jumlah kasus KDRT yang tertangani telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan capaian TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total), Presentasi Peserta KB Aktif Pria, Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), Jumlah Keluarga Aktif Bina Keluarga Balita (BKB), Jumlah Keluarga Aktif Bina Keluarga Lansia (BKL), Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking), Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan, dan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan belum mencapai target yang ditetapkan.

Selama tahun 2011-2015 dalam pelaksanaannya banyak terjadi perubahan dari target yang ditetapkan di Renstra, baik perubahan nominal anggaran, judul kegiatan, bahkan ada judul kegiatan yang dihapus dan adapula judul kegiatan baru. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor antara lain pergantian kepemimpinan di tahun 2012, seringnya mutasi pegawai, dinamika keberhasilan dan kekuatan penganggaran pemerintah daerah.

Tabel 2.4 berikut menguraikan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, seberapa besar anggaran yang disediakan dan realisasi anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi anggaran sudah baik, rata-rata selama tahun 2011-2015 sebesar 92,27%.

Tabel 2.4

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)					(3)					(4 = 3 : 2)				
BELANJA DAERAH	5,256,852,068	5,145,037,989	6,157,178,525	6,518,585,849	7,170,168,400	4,797,173,846	4,775,834,079	5,809,093,176	6,107,960,368	6,399,051,737	91.26	92.82	94.35	93.70	89.25
Belanja tidak langsung	3,471,063,418	3,662,904,359	4,253,546,785	3,418,339,379	3,928,516,700	3,220,347,361	3,511,395,123	4,061,634,481	3,239,782,120	3,642,673,227	92.78	95.86	95.49	94.78	92.72
- Belanja pegawai	3,471,063,418	3,662,904,359	4,253,546,785	3,418,339,379	3,928,516,700	3,220,347,361	3,511,395,123	4,061,634,481	3,239,782,120	3,642,673,227	92.78	95.86	95.49	94.78	92.72
Belanja langsung	1,785,788,650	1,482,133,630	1,903,631,740	3,100,246,470	3,241,651,700	1,576,826,485	1,264,438,956	1,747,458,695	2,868,178,248	2,756,378,510	88.30	85.31	91.80	92.51	85.03
- Belanja pegawai	-	-	-	991,963,000	952,111,000	-	-	-	934,810,100	784,341,000	-	-	-	94.24	82.38
- Belanja barang dan jasa	942,002,150	871,526,530	1,240,165,300	1,455,284,050	1,534,457,700	750,746,535	758,915,556	1,101,118,595	1,350,589,648	1,285,744,910	79.70	87.08	88.79	92.81	83.79
- Belanja modal	843,786,500	610,607,100	663,466,440	652,999,420	755,083,000	826,079,950	505,523,400	646,340,100	582,778,500	686,292,600	97.90	82.79	97.42	89.25	90.89

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
- j. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;
- k. Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal;
- l. Rendahnya kesertaan KB Pria;
- m. Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga masih kurang, terutama di daerah pesisir.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi

ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Tingginya animo masyarakat ikut ber KB;
- h. Mudah nya masyarakat memperoleh informasi tentang KB;
- i. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat;

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Telaahan Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Berdasarkan analisa internal dan eksternal yang ada, sinergi dan koordinasi lintas program di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan terjalin dengan baik, namun fungsi evaluasi, pencatatan dan pelaporan masing-masing hasil kegiatan belum berjalan dengan optimal.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Belum meratanya keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan		Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga cukup sulit dalam mengenali masalah-masalah gender yang ada, jikapun sudah ada namun belum memenuhi kebutuhan	Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan	Lemahnya kelembagaan dan jejaring kerja pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang kurang ramah gender

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan masih kurang		Kurangnya tenaga profesional dalam mengelola kegiatan-kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga kegiatan-kegiatan tidak terkelola secara maksimal	Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang	Redahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak
Peningkatan pengendalian kependudukan	Partisipasi peserta KB meningkat setiap tahun, namun masih terlihat adanya kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan KB		Sosialisasi dan pembinaan tentang KB lebih banyak terhadap perempuan	Pandangan umum tentang KB lebih banyak ditujukan terhadap perempuan dari pada laki-laki	Kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap laki-laki dalam hal memutuskan partisipasi KB
Peningkatan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Sudah terbentuk kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS namun belum optimal dalam pelaksanaan kegiatannya		Honor kader dan biaya operasional kelompok oleh pemerintah masih minim dan belum merata	Lemahnya koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait program ketahanan dan pemberdayaan keluarga	- Koordinasi dan pembinaan Tri Bina belum optimal - Kurangnya keahlian kelompok UPPKS untuk melakukan inovasi dan kreasi sehingga produk yang dihasilkan kalah bersaing di pemasaran

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Pasuruan

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kota Pasuruan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya dan perlu ditetapkan melalui suatu Visi

sehingga kedepan tujuan pembangunan oleh pemerintah dapat terwujud.

Visi Kota Pasuruan adalah

“Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka rumusan Misi Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah

Misi I : Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau;

Misi II : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;

Misi III : Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif;

Misi IV : Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak;

Misi V : Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan;

Misi VI : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik;

Misi VII : Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan mendukung pencapaian Misi ke-II yaitu “Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat” dan Misi ke-IV yaitu “Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak”

Dalam mewujudkan Misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil. Berikut ini merupakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

dari misi yang diembang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 :

Misi II : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan

Tujuan 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja : Indeks Kesehatan;

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator kinerja : Angka Harapan Hidup;

Strategi 2 : Mengendalikan pertumbuhan penduduk

Arah Kebijakan : (7) Penurunan angka Total Fertility Rate (TFR)

(8) Peningkatan kepesertaan KB

Misi IV: Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak

Tujuan 1: Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial, dengan indikator kinerja : (3) tingkat kemiskinan;

Sasaran 1: Menurunnya kemiskinan, dengan indikator kinerja : (2) Tingkat kedalaman kemiskinan;

Strategi 2 : Meningkatkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial

Arah Kebijakan : (3) Pengarusutamaan gender dan hak anak

(4) Peningkatan keluarga sejahtera

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Walikota Pasuruan tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Terhadap Pencapaian

Visi, Misi dan Program Walikota Pasuruan 2016 - 2021

Visi Walikota Pasuruan 2016-2021 : Kota Pasuruan Lebih Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Perdagangan, Jasa dan Industri

No	Misi dan Program Walikota Pasuruan 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi II : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan			
	Program Keluarga Berencana	Rendahnya kesertaan KB Pria	Masih adanya pendapat masyarakat bahwa KB hanya untuk kaum perempuan saja.	Tersedianya Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN KB) untuk pelayanan KB MOP bagi pria.
		Menurunnya rata-rata usia perkawinan	Masih adanya anggapan masyarakat untuk segera menikahkan anak perempuan setelah masa baligh sehingga tanggungjawab sebagai orang tua telah terpenuhi	Adanya KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi anggota PIK-R/M
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Masih terbatasnya jumlah penyuluh KB	Banyaknya Penyuluh KB yang pensiun dan/atau pindah dari jabatan fungsional menjadi struktural.	Tambahan CPNS Penyuluh KB Baru tahun 2015 sebanyak 4 orang.
		Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi	Pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi tidak diikuti perilaku untuk menjadi peserta KB karena khawatir dengan side-effect nya	Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR	Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah	Remaja anggota kelompok PIK-R/M berganti-ganti setiap tahun karena sudah lulus sekolah	Dukungan pembinaan dan sosialisasi tidak hanya dari SKPD-KB juga instansi lainnya
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB	Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB di faskes KB	Banyaknya sarana dan prasarana di faskes yang sudah tidak layak pakai	Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Terbatasnya kualitas dan pengetahuan kader tentang materi program KKBPK	Pendidikan kader yang bervariasi	Kader yang tetap semangat mendukung program KB meskipun sudah usia lanjut

No	Misi dan Program Walikota Pasuruan 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Misi IV : Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak			
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan	Masih terbatas jumlah perempuan didalam kedudukan di dunia politik	Adanya sosialisasi dukungan perempuan di dunia politik
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Lemahnya kelembagaan dan jejaring kerja pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang kurang ramah gender	Kurang optimalnya lembaga dan jejaring dalam melaksanakan perundangan pengarusutamaan gender	Adanya sosialisasi tentang perundangan PUG
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kurangnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan	Kurang optimalnya peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Adanya pembinaan ekonomi produktif dan pembinaan organisasi perempuan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Masih belum terpenuhinya pelatihan dan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan.	Masih minimnya SDM dalam penanganan kasus kekerasan.	Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan.
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)	Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang	Belum adanya manajemen dalam penanganan kasus	Adanya sosialisasi PPT KDRT Dibentuknya pos-pos PPT KDRT di kelurahan
		Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerima korban di tangan masyarakat	Adanya sosialisasi Hak Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Belum adanya standart operasional prosedur pelayanan perlindungan anak	Berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat	Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
		Belum kuatnya kelembagaan dan pemenuhan hak-hak anak (PUHA)	Lemahnya koordinasi antar lintas sektor yang terkait dengan kelembagaan dan pemenuhan hak-hak anak	Adanya Forum Anak Tingkat Kota sampai dengan Tingkat Kelurahan

No	Misi dan Program Walikota Pasuruan 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kelompok BKB, BKR, dan BKL belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB	Kader kelompok mempunyai beban kerja tinggi karena tidak hanya mendukung program KB namun juga program-program Pemerintah lainnya	Jumlah kelompok BKB, BKR, dan BKL yang aktif meningkat setiap tahunnya
	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Belum optimalnya peran kelompok Tri Bina dalam peningkatan ketahanan keluarga	Kelompok Tri Bina kurang aktif melakukan pembinaan	Jumlah kelompok Tri Bina yang dibentuk sudah cukup banyak
		Belum optimalnya peran kelompok UPPKS dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	Belum optimalnya peran kelompok UPPKS dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga	Belum optimalnya peran kelompok UPPKS dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Masih belum / kurangnya koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait program pemberdayaan masyarakat.	Belum maksimalnya kader karena banyak kader yang merangkap sebagai kader yang lain.	Melakukan Koordinasi secara intensif dengan lintas sektor terkait.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks Pembangunan Gender (IPG).

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
(Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun)

- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak.

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2015-2019

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

INDIKATOR	BASELINE	TARGET KINERJA					2015-2019
	TARGET2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3 Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 yang diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan
 - b) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG).
- 2) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim.

3) Meningkatnya pengendalian penduduk.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- a) Cakupan KB aktif; dan
- b) Persentase Data Kependudukan yang akurat.

Dari Renstra BKKBN dan Renstra Kementerian PPPA diatas, analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L Atau Renstra SKPD Prov.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak	Masih banyaknya OPD yang belum melakukan PUG	Permendagri 67/2011
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak	Masih banyaknya OPD yang belum melakukan PUG	Permendagri 67/2011
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah laporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2011-2015 cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 31 laporan tindak kekerasan.	Dukungan anggaran untuk pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terbatas untuk 12 kasus saja	Uu Nomor 7 Tahun 1984

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L Atau Renstra SKPD Prov.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat terhadap perlindungan perempuan	UU 23 Tahun 2004 PKDRT
5	Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak	Masih kurangnya OPD yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan	UU 35 Tahun 2014 (UUPA) dan Dukungan Walikota Pasuruan terhadap Perlindungan Anak dengan upaya mewujudkan Kota Layak Anak
6	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak	Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)
7	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak	Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak	Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak	Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum terungkap karena anak-anak itu masih kecil dan sangat polos, hanya menerima perlakuan dan tidak bisa melakukan pembelaan diri	Dukungan Walikota Pasuruan terhadap Perlindungan Anak dengan upaya mewujudkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L Atau Renstra SKPD Prov.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Renstra BKKBN 2015-2019	Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sebesar 2,11	Masih ada beberapa golongan masyarakat yang tidak setuju jumlah anak hanya dibatasi 2 anak saja, terutama jika ada keluarga yang belum memiliki keturunan anak laki-laki	UU No 52 tahun 2009 dan Penguatan Advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP) menjadi prioritas utama BKKBN
10	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Renstra BKKBN 2015-2019	Jumlah peserta KB sudah meningkat namun rata-rata 68,71% selama tahun 2011-2015 masih memilih kontrasepsi non-MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).	Jumlah peserta JKN masih sedikit dan tidak semua memahami manfaat menjadi peserta JKN dalam pelayanan kontrasepsi.	Dukungan alat dan obat kontrasepsi KB dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk Pasangan Usia Subur dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Renstra BKKBN 2015-2019	Unmetneed di Kota Pasuruan selama tahun 2011-2015 cenderung menurun namun pencapaiannya masih kurang dari target yang diharapkan.	Jumlah peserta KB Baru meningkat setiap tahunnya, namun seiring dengan kenaikan jumlah peserta KB Baru juga disertai banyaknya jumlah peserta KB Aktif yang Drop Out	Dukungan anggaran untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terutama untuk peserta KB baru murni dan pasca melahirkan/keguguran.
12	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Renstra BKKBN 2015-2019	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Anggapan masyarakat bahwa masalah KB adalah urusan perempuan	Ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB
13	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Renstra BKKBN 2015-2019	Jumlah peserta KB Non MKJP lebih banyak daripada peserta KB MKJP	Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga	Dukungan alat dan obat kontrasepsi KB dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk Pasangan Usia Subur dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pasuruan

Terkait dengan kajian atas tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis, dalam RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021 dikembangkan kebijakan umum yang terkait dengan masalah kewilayahan. Dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan fokusnya adalah pembangunan Kota Pasuruan diarahkan pada pemantapan perkotaan, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.

Selain itu dilakukan penetapan cluster kewilayahan, dengan membagi wilayah Kota Pasuruan dalam 2 (dua) cluster meliputi:

1. Cluster Agropolitan Ijen, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata dan agrobisnis.
2. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kurang terlayani dalam proses pembangunan, dengan potensi unggulan ekonomi di sektor perikanan dan pariwisata.

Kebijakan pengembangan wilayah dan penetapan kewilayahan pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera beserta pengembangan program-programnya, kecuali untuk program Kampung KB sebagai miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat terendah, diluncurkan di wilayah cluster 2 khususnya daerah miskin, padat penduduk, dan akses kesehatan kurang.

Tabel 3.4

Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi
DPPPAKB Kota Pasuruan

No	Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur Ruang / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
NIHIL					

3.5 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Suatu kondisi atau hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat hasil telaahan-telaahan diatas.Isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi DPPPAKB Kota Pasuruan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga perempuan.
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan.
3. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak.
4. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB. Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung turun. Kesertaan

KB Pria masih rendah, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi.

5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan.
6. Belum optimalnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah. Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah. Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan Keluarga.
- b. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Meningkatnya kepedulian masyarakat ber-Keluarga Berencana

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah : Meningkatnya Keluarga Berencana.

3. Meningkatnya peran serta keluarga dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah : Meningkatnya Keluarga Sejahtera.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Matrik Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

Visi : Kota Pasuruan lebih Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Perdagangan Jasa dan Industri.

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Strategi		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran						Program	
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)						(8)	
I	MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	I.1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	I.1.a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	I.1.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	I.1.1.a	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	I.1.1.a.1	Persentase angkatan kerja perempuan	54%	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
				I.1.b	Indeks Pemberdayaan Gender	I.1.1		I.1.1.a.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan dunia usaha	18%	-	-	-	-	-	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
				I.1.c	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	I.1.2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	I.1.2.a	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	I.1.2.a.1	Persentase penurunan kasus KDRT dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	1%	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				I.1.d	Capaian Indikator Kota Layak Anak														
		I.2	Meningkatnya kepedulian masyarakat ber-Keluarga Berencana dan peran serta keluarga dalam pembangunan	I.2.a	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	I.2.1	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor	I.2.1.a	Meningkatnya pengendalian kependudukan	I.2.1.a.1	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1	-	-	-	-	-	-	Program Keluarga Berencana

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Strategi		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran						Program
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)						(8)
										I.2.1 a.2	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	2.1	-	-	-	-	-	Program Pelayanan Kontrasepsi
										I.2.1 a.3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	76.75%	-	-	-	-	-	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR
																		Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB
			I.2.b	Persentase Keluarga Sejahtera I	I.2.2	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor	I.2.2. a	Meningkatnya pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	I.2.2 a.1	Persentase kelompok Tri Bina dan UPPKS yang aktif melakukan pembinaan	79.78%	-	-	-	-	-	-	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
																		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
							I.2.2. b	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin khususnya beras	I.2.2 b.1	Persentase pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)	100%	-	-	-	-	-	-	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial
SETELAH PERUBAHAN I																		

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Strategi		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran					Program	
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		2021
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)					(8)	
I	MISI III Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif	1.1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Perempuan dan Anak	1.1.a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1.1.1	Meningkatkan perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan Keluarga	1.1.1.a	Meningkatnya perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan Keluarga	1.1.1.a.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	96.48	96.57	96.65	96.74	96.83	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
				1.1.1.a.2	Indeks Pemberdayaan Gender					-	54.82	55.48	56.15	56.82	57.50			
				1.1.1.a.3	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan					-	5.56%	5.88%	6.25%	6.67%	7.14%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
				1.1.1.b.1	Capaian Indikator Kota Layak Anak					-	750	800	850	900	1000	Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)		
		1.2	Meningkatnya kepedulian masyarakat ber-Keluarga Berencana dan peran serta keluarga dalam pembangunan	1.2.a	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	1.1.1	Meningkatkan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.1.1.a	Meningkatnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.1.1.a.1	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	2.10	2.09	2.07	2.06	2.05	2.04	Program Keluarga Berencana
												1.1.1.a.2	Persentase Keluarga Sejahtera I	-	33.24%	33.16%	32.97%	32.78%

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Strategi		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran						Program
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
																		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR
																		Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB
																		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
																		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
																		Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan
SETELAH PERUBAHAN II																		
I	MISI II Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	I.1	Meningkatnya kepedulian masyarakat ber-Keluarga Berencana	I.1.a	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	I.1.1	Meningkatkan Keluarga Berencana	I.1.1.a	Meningkatnya Keluarga Berencana	I.1.1.a.1	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	2.10	2.09	2.07	2.06	2.05	2.04	Program Keluarga Berencana

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Strategi		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran						Program
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
																		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
II	MISI IV Meningkatkan pengembangan perdagangan, jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup	II.1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Perempuan dan Anak	II.1.a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II.1.1	Meningkatkan perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan Keluarga	II.1.1.a	Meningkatnya perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan Keluarga	II.1.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	96.48	96.57	96.65	96.74	96.83	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				II.1.b	Indeks Pemberdayaan Gender					II.1.1.2	Indeks Pemberdayaan Gender	-	54.82	55.48	56.15	56.82	57.50	
				II.1.c	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan					II.1.1.3	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	-	5.56%	5.88%	6.25%	6.67%	7.14%	
				II.1.d	Capaian Indikator Kota Layak Anak					II.1.2	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	II.1.2.a	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	-	750	800	850	
		II.2	Meningkatnya peran serta keluarga dalam pembangunan	II.2.a	Persentase Keluarga Sejahtera I	II.2.1	Meningkatkan Keluarga Sejahtera	II.2.1.a	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	II.2.1.1	Persentase Keluarga Sejahtera I	-	33.24%	33.16%	32.97%	32.78%	32.59%	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Program Pemberdayaan Masyarakat

4.2 Strategi dan Kebijakan

4.2.1 Strategi

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan menetapkan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan melaksanakan PUG melalui pelaksanaan PPRG, penguatan kelembagaan PUG, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi maupun politik;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas penanganan pengaduan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan mendorong perangkat daerah, pelaku usaha dan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata dengan penguatan dan pepaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap Fasilitas Kesehatan KB;
5. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga dengan pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok remaja (PIK KRR/Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) dan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
6. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4.2.2 Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan merumuskan kebijakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking, khususnya melalui Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
3. Percepatan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dalam penganggaran dan pembangunan;
4. Pengarusutamaan hak anak dalam keterpenuhan fasilitas publik yang ramah anak;
5. Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera;
6. Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga;
7. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
8. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dan sosialisasi;
9. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan;

10. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta promosi dan penggerakan penggunaan alat dan obat kontrasepsi kepada masyarakat;
11. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara internal maupun bekerjasama dengan PPKBK, Sub PPKBK dan mitra kerja.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan administrasi perkantoran;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar;
 - f. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - g. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - a. Kegiatan Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS;
 - b. Kegiatan Pembinaan Rohani Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian;
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
 - d. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan;
 - e. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik OPD dan Pengelolaan Kepegawaian;
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - b. Kegiatan Lomba P2WKSS;
 - c. Kegiatan Pembinaan P2WKSS;
 - d. Kegiatan Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI);

- e. Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan;
 - f. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan;
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;
- a. Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif;
 - b. Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan;
 - c. Kegiatan Revitalisasi Pokja PUG;
 - d. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender;
 - e. Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bagi Kader KB;
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- a. Kegiatan Pemutakhiran Profil Gender;
8. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA);
- a. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Rokok Pada Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan (DBHCHT);
 - b. Kegiatan Verifikasi Kota Layak Anak;
 - c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Media KIE;
 - d. Kegiatan Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak);
 - e. Kegiatan Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA);
 - f. Kegiatan Fasilitasi Forum Anak;
 - g. Kegiatan Penyusunan Profil Anak;
9. Program Keluarga Berencana;
- a. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi;
 - b. Kegiatan Gebyar Tentara Manunggal KB-Kesehatan;
 - c. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - d. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga;
 - e. Kegiatan Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK;
 - f. Kegiatan Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader;

- g. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB;
 - h. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK;
 - i. Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana;
 - j. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB;
 - k. Kegiatan Sosialisasi Program KB bagi PUS Unmetneed;
 - l. Kegiatan Fasilitasi partisipasi HARGANAS Tingkat Propinsi dan Nasional;
 - m. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK);
 - n. Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik);
 - o. Kegiatan Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional tingkat kota;
10. Program Pelayanan Kontrasepsi;
- a. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB;
11. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
- a. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB;
 - b. Kegiatan TOT Bagi Kader IMP Tentang Dampak Bahaya Asap Rokok Bagi Lingkungan (DBHCHT);
 - c. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. Kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UPPKS;
 - e. Kegiatan Roadshow Hari Keluarga;
 - f. Kegiatan Gelar Produk UPPKS;
 - g. Kegiatan Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK;
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba KB/KS;
 - i. Kegiatan Pelatihan Penggunaan Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan (ABPK) bagi PPKBK dan Sub PPKBK;
 - j. Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Penyuluh KB;
 - k. Kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa;

- l. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - m. Kegiatan Pembinaan kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja;
 - n. Kegiatan Sosialisasi Program Generasi Berencana bagi siswa SLTP dan SLTA;
 - o. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba GenRe;
 - p. Kegiatan Penyebarluasan Informasi program PP,PA dan KB melalui Mobil Penerangan KB;
 - q. Kegiatan Pelatihan Konselor Sebaya dan Pendidik Sebaya bagi Pengurus PIK -Remaja/Mahasiswa;
12. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR;
- a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB Melalui Mobil Penerangan KB;
 - b. Kegiatan Sosialisasi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa (DBHCHT);
 - c. Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja;
 - d. Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
 - e. Kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa;
 - f. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Genre;
 - g. Kegiatan Orientasi Pengelola Genre Bagi Kelompok BKR;
 - h. Kegiatan Pembuatan Seragam PIK-R dan Forum Anak;
 - i. Kegiatan Sosialisasi Program Generasi Berencana Bagi Siswa SLTP;
13. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
- a. Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS dan Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana;
 - b. Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita;
 - c. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah;

- d. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tri Bina;
 - e. Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja;
 - f. Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia;
 - g. Kegiatan Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR;
14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB;
- a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK);
 - b. Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial;
- a. Kegiatan Fasilitasi Pendistribusian Raskin;
 - b. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
16. Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan;
- a. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat & Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sejahtera;
17. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- a. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. Kegiatan Pelatihan Dasar Penanganan Kasus PPT Perlindungan Perempuan;
 - c. Kegiatan Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - d. Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penanganan Tindak Kekerasan Bagi Perempuan;
 - e. Kegiatan Penyebaran Informasi Program Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif;
 - g. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan;
 - h. Kegiatan Pemutakhiran Profil Gender;
 - i. Kegiatan Pembinaan P2WKSS;
 - j. Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan;
 - k. Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - l. Kegiatan Fasilitasi APE (Anugerah Parahita Ekapraya);

18. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perlindungan Anak;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Forum Anak Kota Pasuruan;
 - c. Kegiatan Sosialisasi Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - d. Kegiatan Profil Anak Kota Pasuruan;
 - e. Kegiatan Fasilitasi Kota Layak Anak;
 - f. Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (PUHA);
 - g. Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Anak (LDKA);
 - h. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Kota Layak Anak;
 - i. Kegiatan Gebyar Forum Anak Kota Pasuruan;
 - j. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak;
19. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga;
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan lomba KB/KS;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB;
 - c. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tribina;
 - d. Kegiatan Pelatihan Kader Tribina;
 - e. Kegiatan Updating Data Kelompok Tribina;
 - f. Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
 - g. Kegiatan Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan keluarga sejahtera;
 - h. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS;
 - i. Kegiatan Gelar produk UPPKS;
 - j. Kegiatan Updating Data Kelompok UPPKS;
20. Program Pemberdayaan Masyarakat;
 - a. Kegiatan Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota / Propinsi / Nasional;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dan HKG-PKK;

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilansuatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan

evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk melihat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan selama tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg-SPM	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kinerja akhir (2021)				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												(9)	(10)					
1.1	1.1.1.a	1.1.1.a.1 1.1.1.a.2	1.11.1.11.1.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan yg bekerja		54%	124,900	55%	68,500								55%	193,400						
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		6%		17.33%												17.33%				
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif		2.86%		2.86%													2.86%			
					Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha		45%		14.45%													14.45%			
			1.11.1.11.1.18.07	Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapat pelatihan	40 Orang	40 Orang	9,500	40 Orang	12,500										80 Orang	22,000		Kota Pas.		
			1.11.1.11.1.18.11	Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan	Jumlah orang yang mendapat pembinaan manajemen	40 Orang	510 Orang	89,400	200 Orang	30,000										710 Orang	119,400		Kota Pas.		
			1.11.1.11.1.18.13	Kegiatan Revitalisasi Pokja PUG	Jumlah orang pokja pengarusutamaan gender yang mendapat fasilitasi	40 Orang	120 Orang	16,000	120 Orang	16,000										240 Orang	32,000		Kota Pas.		
			1.11.1.11.1.18.14	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi anggaran responsif gender dari SKPD Kota Pasuruan	40 Orang	80 Orang	10,000	80 Orang	10,000										160 Orang	20,000		Kota Pas.		
			1.11.1.11.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah jenis data dan informasi perempuan yang tersedia		5 Jenis Data	7,500												5 Jenis Data	7,500				
			1.11.1.11.1.16.11	Kegiatan Pemutakhiran Profil Gender	Jumlah jenis data profil gender yang dimutakhirkan	5 Jenis data	5 Jenis data	7,500												5 Jenis data	7,500		Kota Pas.		
	1.1.2.b	1.1.2.b.1 1.1.2.b.2	1.11.1.11.1.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Persentase pengaduan korban KDRT dan kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang tertangani		100%	281,900	100%	307,500								100%	589,400						
					2. Jumlah prestasi lomba yang diikuti		2 Prestasi		2 Prestasi											2 Prestasi					
			1.11.1.11.1.17.08	Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah bulan pemenuhan tenaga sekretariat PPT-KDRT	12 Bulan	12 Bulan	36,000	12 Bulan	44,000										72 Bulan	80,000		Kota Pas.		
				Jumlah kasus KDRT yang mendapat pendampingan	-	50 Kasus		40 Kasus									280 Kasus		Keg. SPM	Kota Pas.					
				Jumlah orang yang mengikuti rapat pos PPT kelurahan dan sosialisasi KDRT	45 Orang	35 Orang		50 Orang										285 Orang			Kota Pas.				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg-SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			1.11.1.11.1.17.10	Kegiatan Lomba P2WKSS	Jumlah orang yang mengikuti lomba peningkatan peran serta wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera tingkat kota di Kelurahan Kandangsapi	-	50 Orang	17,500	50 Orang	17,500								300 Orang	35,000		Kota Pas.	
					Jumlah orang yang mendapat pembinaan dan dikirim sebagai delegasi Kota Pasuruan dalam lomba tingkat Propinsi	-	25 Orang		25 Orang									150 Orang			Kota Pas.	
			1.11.1.11.1.17.11	Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi pembinaan P2WKSS	40 Orang	1.200 Orang	178,400	1.200 Orang	196,000								7.200 Orang	374,400		Kota Pas.	
			1.11.1.11.1.17.13	Kegiatan Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah kader GSI yang mendapat pembinaan Pokja GSI	340 Kader GSI	200 Kader GSI	30,000	200 Kader GSI	30,000								1.200 Kader GSI	60,000		Kota Pas.	
			1.11.1.11.1.17.14	Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba pembinaan kader teladan dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	400 Peserta	400 Peserta	20,000	400 Peserta	20,000								2.400 Peserta	40,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.11.1.11.1.22	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)	Kota Pasuruan masuk dalam kategori Kota Layak Anak		100%	157,133	100%	152,000								100%	309,133			
					Jumlah media penyebarluasan informasi program		4 Media		3 Media									3 Media				
			1.11.1.11.1.22.xx	Kegiatan Sosialisasi Bahaya Rokok Pada Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan (DBHCHT)	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi bahaya rokok pada forum anak kota, kecamatan & kelurahan	-	313 Orang	44,133	-	-								313 Orang	44,133		Kota Pas.	
			1.11.1.11.1.22.08	Kegiatan Verifikasi Kota Layak Anak	Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan dan pertemuan verifikasi penilaian Kota layak Anak	120 Orang	51 Orang	15,000	60 Orang	30,000								331 Orang	45,000		Kota Pas.	
			1.11.1.11.1.22.09	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Media KIE	Jumlah lembar poster kegiatan yang dibuat	-	204 Lembar	20,000	-	50,000								204 Lembar	70,000		Kota Pas.	
					Jumlah leaflet kegiatan yang dibuat	-	2.500 Lembar		-									2.500 Lembar				
					Jumlah umbul-umbul generasi berencana yang dibuat	-	50 Lembar		-									50 Lembar				
					Jumlah kaos kegiatan yang dibuat	-	120 Buah		400 Buah									520 Buah				
					Jumlah umbul-umbul Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang dibuat	-	-		50 Lembar	-								100 Lembar				
					Jumlah roll banner yang dibuat	-	-		10 Buah	-								10 Buah				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)								
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)					
					Jumlah umbul-umbul Kota Layak Anak (KLA) yang dibuat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.11.1.11.1.22.12	Kegiatan Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak)	Jumlah bulan pemenuhan tenaga sekretariat tim advokasi KLA	-	12 Bulan	22,500	12 Bulan	26,000																	Kota Pas.
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan penyuluhan jejaring advokasi	-	55 Orang		65 Orang																		
			1.11.1.11.1.22.13	Kegiatan Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas KLA	100 Orang	200 Orang	12,500	50 Orang	10,000																	Kota Pas.
			1.11.1.11.1.22.14	Kegiatan Fasilitasi Forum Anak	Jumlah bulan pemenuhan operasional sekretariat forum anak	12 Bulan	12 Bulan	28,000	12 Bulan	36,000																	Kota Pas.
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan rapat sosialisasi sebab akibat nikah dini, bahaya narkoba, rokok dan seks bebas, hidup bersih dan sehat	130 Orang	114 Orang		125 Orang																		
			1.11.1.11.1.22.15	Kegiatan Penyusunan Profil Anak	Jumlah data tentang anak yang tersusun	-	5 Data	15,000																			Kota Pas.
					Jumlah orang sebagai petugas supervisi, pengawas lapangan, pendataan dan penyusun draft	-	45 Orang																				
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan profil anak	-	36 Orang																				
1.2	1.2.1.a	1.2.1.a.1 1.2.1.a.2 1.2.1.a.3	1.12.1.11.1.15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	80.05%	76.75%	132,500	77.79%	174,000	77.46%		77.91%		78.39%		78.92%		78.92%		306,500						
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun						
			1.12.1.11.1.15.03	Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan komplikasi dan kegagalan		5 Orang	15,000	5 Orang	20,000	5 Orang	77,506	5 Orang	77,506	5 Orang	77,508	5 Orang	77,509	30 Orang	345,029							Kota Pas.
					Jumlah akseptor yang tes sperma		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		30 Orang								
					Jumlah akseptor yang tes papsmear		34 Orang		68 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		582 Orang								
			1.12.1.11.1.15.09	Kegiatan Gebyar Tentara Manunggal KB-Kesehatan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Gebyar TNI Manunggal KB Kesehatan	275 Orang	300 Orang	15,000	300 Orang	18,000	260 Orang	89,152	260 Orang	89,152	260 Orang	89,152	260 Orang	89,152	1,640 Orang	389,608			Keg. SPM			Kota Pas.	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			1.12.1.11.1.15.11	Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	70 Orang	46 Orang	20,000	60 Orang	30,000								106 Orang	50,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.15.14	Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan rapat pembinaan keluarga sejahtera	250 Orang	180 Orang	20,000	185 Orang	25,000								365 Orang	45,000		Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.15.15	Kegiatan Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan teknis KIE	45 Orang	28 Orang	17,500	60 Orang	30,000								88 Orang	47,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.15.16	Kegiatan Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader	Jumlah orang yang mengikuti orientasi pengelola program KB bagi Kader	-	35 Orang	27,500	35 Orang	29,000	102 Orang	65,044						172 Orang	121,544	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.15.17	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB	Jumlah orang yang mengikuti monitoring dan evaluasi kinerja program KB	-	68 Orang	17,500	70 Orang	22,000	70 Orang	72,053						208 Orang	111,553	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Baru		4.014 Peserta	37,500	4.100 Peserta	7,500								4100 Peserta	45,000			
			1.12.1.11.1.17.02	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kontrasepsi KB metode MOP, IUD dan Implant di Mobil Pelayanan KB	175 Orang	195 Orang	37,500	100 Orang	7,500								295 Orang	45,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR	Frekuensi penyebarluasan informasi program dengan Mobil Penerangan KB		7 Kali	213,500	10 Kali	100,000								10 Kali	313,500			
					Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif		19 Kelompok		20 Kelompok									20 Kelompok				
			1.12.1.11.1.20.03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB Melalui Mobil Penerangan KB	Jumlah frekuensi penyebarluasan informasi program PP dan KB melalui pemutaran film dan pemberian informasi ke masyarakat dengan MUPEN	17 Kali	7 Kali	12,500	10 Kali	18,000								17 Kali	30,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah video film dokumentasi tentang kegiatan penyebarluasan informasi program PP dan KB yang dibuat	-	3 Buah		3 Buah									6 Buah				
			1.12.1.11.1.20.04	Kegiatan Sosialisasi Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa (DBHCHT)	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dampak rokok terhadap kesehatan reproduksi remaja/mahasiswa kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa	-	196 Orang	44,000	-	-								196 Orang	44,000		Kota Pas.	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			1.12.1.11.1.20.05	Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada kelompok PIK Remaja/Mahasiswa	54 Orang	50 Orang	15,000	-	-								50 Orang	15,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.20.06	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi kegiatan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa	-	19 Kelompok	19,500	20 Kelompok	25,000								39 Kelompok	19,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.20.07	Kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah orang yang mengikuti jambore PIK remaja/mahasiswa	-	100 Orang	30,000	100 Orang	37,000								200 Orang	30,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.20.08	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Genre	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti lomba Genre	-	27 Kelompok	15,000	27 Kelompok	20,000								54 Kelompok	35,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.20.09	Kegiatan Orientasi Pengelola Genre Bagi Kelompok BKR	Jumlah orang yang mengikuti orientasi pengelola Genre bagi Kelompok BKR	-	40 Orang	15,000	-	-								40 Orang	15,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.20.10	Kegiatan Pembuatan Seragam PIK-R dan Forum Anak	Jumlah seragam PIK-R yang disediakan	-	220 Seragam	62,500	-	-								220 Seragam	62,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah seragam forum anak yang disediakan	-	179 Seragam	-	-	-								179 Seragam	-			
			1.12.1.11.1.25	Program Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB	Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana		53%	752,258	19,76%	736,100			336,100		336,100		336,100	19,76%	2,832,758			
					Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana		0%		18,60%									18,60%				
			1.12.1.11.1.25.01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Jumlah kader yang mendapat sarana dan prasarana kerja		175 Kader	561,908	77 Kader	400,000								252 Kader	961,908	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah unit konseling kit (ABPK) yang tersedia bagi petugas penyuluh KB		28 Unit	-										28 Unit				
					Jumlah unit panduan praktis pelayanan kontrasepsi (BP3K) yang tersedia bagi petugas penyuluh KB		4 Unit	-										4 Unit				
					Jumlah unit sarana dan prasarana PPKS yang tersedia bagi kader KB		2 Unit	-										2 Unit				
					Jumlah unit sarana dan prasarana kerja yang tersedia bagi kelompok PIK-R		2 Unit		3 Unit									5 Unit				
			1.12.1.11.1.25.02	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional	-	4 Balai	190,350	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	16 Balai	1,870,850		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														(9)	(10)
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
	1.2.2.a	1.2.2.a.1	1.12.1.11.1.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	432	33%	349,998	6%	307,360								6%	657,358			
					Jumlah UPPKS yang aktif		81 Kelompok	686	83 Kelompok	901								83 Kelompok	1,587			
			1.12.1.11.1.18.01	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB	Jumlah orang yang mengikuti rapat pembinaan kelompok masyarakat mitra program KB	73 Orang	140 Orang	25,000	140 Orang	28,000								280 Orang	53,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah orang pelugas pusingan gra yang mendapat honorarium	-	4 Orang		4 Orang									8 Orang				
			1.12.1.11.1.18.xx	Kegiatan TOT Bagi Kader IMP Tentang Dampak Bahaya Asap Rokok Bagi Lingkungan (DBHCHT)	Jumlah orang yang mengikuti TOT lini lapangan tentang dampak bahaya asap rokok bagi lingkungan	-	106 Orang	131,123	-	-								106 Orang	131,123		Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.18.08	Kegiatan Roadshow Hari Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti roadshow hari keluarga	-	150 Orang	12,500	175 Orang	35,000								325 Orang	47,500		Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.18.10	Kegiatan Gelar Produk UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti Gelar Produk pada event pameran	30 Kelompok	30 Kelompok	12,500	40 Kelompok	30,000								70 Kelompok	42,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.18.14	Kegiatan Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Jumlah orang yang mendapat honorarium PPKBK dan sub PPKBK	329 Orang	329 Orang	147,205	329 Orang	189,360	329 Orang	357,133	329 Orang	357,133	329 Orang	357,133	329 Orang	357,133	1974 Orang	1,765,097	Keg. SPM	Kota Pas.
					Jumlah orang yang mengikuti rapat evaluasi PPKBK dan sub PPKBK	-	330 Orang		330 Orang	340 Orang								1000 Orang				
			1.12.1.11.1.18.18	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba KB/KS	Jumlah orang yang melaksanakan lomba KB/KS tingkat kota	36 Orang	36 Orang	21,670	56 Orang	25,000								92 Orang	46,670	Keg. SPM	Kota Pas.	
			1.12.1.11.1.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif		85 Kelompok	272,186	90 Kelompok	450,000								90 Kelompok	722,185.5			
					Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif		20 Kelompok		20 Kelompok									20 Kelompok				
					Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif		42 Kelompok		43 Kelompok									43 Kelompok				
			1.12.1.11.1.23.04	Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS dan Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana	Jumlah data KB/KS dan data KB dari Klinik KB yang tervalidasi		2.500 KK	87,500	2.510 KK	168,000								5010 KK	255,500	Keg. SPM		
			1.12.1.11.1.23.05	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kader Bina Keluarga Balita	80 Orang	40 Orang	15,000	80 Orang	25,000								120 Orang	40,000	Keg. SPM		
			1.12.1.11.1.23.06	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah orang yang mendapat fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan hibah	-	34 Orang	9,686	-	-								34 Orang	9,686			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Ind./Keg-SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)					
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																(9)	(10)
			1.12.1.11.1.23.10	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Tri Bina	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi rapat kelompok tribina	-	3.000 Peserta	115,000	3.000 Peserta	200,000										6000 Peserta	315,000	Keg-SPM		
			1.12.1.11.1.23.11	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kader Bina Keluarga Remaja	-	40 Orang	15,000	40 Orang	17,000										920 eksemplar				
			1.12.1.11.1.23.12	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kader Bina Keluarga Lansia	40	40 Orang	15,000	45 Orang	20,000											85 Orang	35,000		
			1.12.1.11.1.23.13	Kegiatan Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan parenting bagi kelompok BKR	-	41 Orang	15,000	50 Orang	20,000											91Orang	35,000		
	1.2.2.b	1.2.2.b.1	1.11.1.11.1.20	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan Raskin	-	9.437 RTSPM	294,799													9.437 RTSPM	294,799		
			1.11.1.11.1.20.01	Kegiatan Fasilitasi Pendistribusian Raskin	Jumlah orang yang menerima honorarium tim pendistribusian, tenaga pendistribusian, tenaga bongkat muat dan pengurus pokmas raskin	-	1.098 Orang	286,299													1.098 Orang	286,299		
			1.11.1.11.1.20.02	Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah orang kader yang mengikuti pelatihan mengelola kelompok UPPKS	80 Orang	40 Orang	8,500													40 Orang	8,500	Keg-SPM	
SETELAH PERUBAHAN I																								
1.1	1.1.1.a	1.1.1.a.1 1.1.1.a.2 1.1.1.a.3	2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan			124,900	17.33%	40,000											17%	164,900		
					Persentase perempuan dalam dunia usaha				14.45%													14.45%		
			2.02.2.02.01.18.07	Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapat pelatihan	40 Orang	40 Orang	9,500	40 Orang	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 Orang	19,500		Kota Pas.
			2.02.2.02.01.18.11	Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan	Jumlah orang yang mendapat pembinaan manajemen	40 Orang	510 Orang	89,400	200 Orang	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710 Orang	119,400		Kota Pas.
			2.02.2.02.01.18.13	Kegiatan Revitalisasi Pokja PUG	Jumlah orang pokja pengarusutamaan gender yang mendapat fasilitasi	40 Orang	120 Orang	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 Orang	16,000		Kota Pas.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														(9)	(10)
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
			2.02.2.02.01.18.14	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi anggaran responsif gender dari SKPD Kota Pasuruan	40 Orang	80 Orang	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 Orang	10,000		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.18.15	Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bagi Kader KB	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	150 Orang	32,375	-	-	-	-	-	-	-	150 Orang	32,375		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani		100%	281,900	100%	226,659	-	-	-	-	-	-	-	100%	508,559			
			2.02.2.02.01.17.08	Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah bulan pemenuhan tenaga sekretariat PPT-KDRT	12 Bulan	12 Bulan	36,000	12 Bulan	64,000	-	-	-	-	-	-	-	72 Bulan	100,000		Kota Pas.	
					Jumlah kasus KDRT yang mendapat pendampingan	-	50 Kasus		40 Kasus									280 Kasus		Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah orang yang mengikuti rapat pos PPT kelurahan dan sosialisasi KDRT	45 Orang	35 Orang		50 Orang									285 Orang			Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.17.10	Kegiatan Lomba P2WKSS	Jumlah orang yang mengikuti lomba peningkatan peran serta wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera tingkat kota di Kelurahan Kandang sapi	-	50 Orang	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	17,500		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.17.11	Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah orang yang mendapat pembinaan peningkatan emansipasi wanita	40 Orang	1.200 Orang	178,400	350 Orang	88,000	-	-	-	-	-	-	-	1550 Orang	266,400		Kota Pas.	
					Jumlah orang yang mendapat pembinaan mental keagamaan				351 Orang									351 Orang				
					Jumlah orang yang mengikuti seminar sehari manajemen organisasi wanita				352 Orang									352 Orang				
					Jumlah orang yang mendapat pembinaan kelembagaan organisasi wanita				310 Orang									310 Orang				
			2.02.2.02.01.17.13	Kegiatan Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah kader GSI yang mendapat pembinaan Pokja GSI	340 Kader GSI	200 Kader GSI	30,000	200 Kader GSI	30,000	-	-	-	-	-	-	-	1.200 Kader GSI	60,000		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.17.14	Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba pembinaan kader teladan dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	400 Peserta	400 Peserta	20,000	400 Peserta	44,659	-	-	-	-	-	-	-	2.400 Peserta	64,659	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.02.2.02.1.17.15	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	-	-	-	300 Orang	28,074								300 Orang	28,074			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ind./Keg-SPM	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kinerja akhir (2021)	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
	1.1.2.b	1.1.2.b.1	2.02.2.02.01.21	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan		-	80%	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	176,000			
					Persentase Forum Anak yang aktif			100%										100%				
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani			100%										100%				
					Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan hak anak			80%										80%				
			2.02.2.02.01.21.01	Kegiatan Gebyar Forum Anak	Jumlah orang yang mengikuti Gebyar Forum Anak Kota Pasuruan	-	-	1000 Orang	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1000 Orang	176,000		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.22	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)	Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan			113,000	80%	120,000	-	-	-	-	-	-	-	80%	233,000			
					Persentase Forum Anak yang aktif				100%										100%			
					Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani				100%										100%			
					Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan hak anak				80%										80%			
			2.02.2.02.01.22.08	Kegiatan Verifikasi Kota Layak Anak	Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan dan pertemuan verifikasi penilaian Kota layak Anak	120 Orang	51 Orang	15,000	30 Orang	17,000	-	-	-	-	-	-	-	81 Orang	32,000		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.22.09	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Media KIE	Jumlah lembar poster kegiatan yang dibuat	-	204 Lembar	20,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	204 Lembar	41,000		Kota Pas.	
					Jumlah leaflet kegiatan yang dibuat	-	2.500 Lembar											2.500 Lembar				
					Jumlah umbul-umbul yang dibuat	-	50 Lembar		50 lembar									100 Lembar				
					Jumlah kaos yang dibuat	-	120 Buah		400 Buah									520 Buah				
					Jumlah roll banner yang dibuat	-		10 Buah										10 Buah				
			2.02.2.02.01.22.12	Kegiatan Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak)	Jumlah bulan pemenuhan tenaga sekretariat tim advokasi KLA	-	12 Bulan	22,500	12 Bulan	30,000	-	-	-	-	-	-	-	24 Bulan	52,500		Kota Pas.	
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan penyuluhan jejaring advokasi	-	55 Orang		65 Orang									120 Orang				
			2.02.2.02.01.22.13	Kegiatan Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas KLA	100 Orang	200 Orang	12,500	50 Orang	10,000	-	-	-	-	-	-	-	250 Orang	22,500		Kota Pas.	
			2.02.2.02.01.22.14	Kegiatan Fasilitasi Forum Anak	Jumlah bulan pemenuhan operasional sekretariat forum anak	12 Bulan	12 Bulan	28,000	12 Bulan	42,000	-	-	-	-	-	-	-	24 Bulan	70,000		Kota Pas.	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg-SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan rapat sosialisasi sebab akibat nikah dini, bahaya narkoba, rokok dan seks bebas, hidup bersih dan sehat	130 Orang	114 Orang		125 Orang									239 Orang				
			2.02.2.02.01.22.15	Kegiatan Penyusunan Profil Anak	Jumlah data tentang anak yang tersusun	-	5 Data	15,000										5 Data	15,000	Kota Pas.		
					Jumlah orang sebagai petugas supervisi, pengawas lapangan, pendataan dan penyusun draft	-	45 Orang											45 Orang				
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan profil anak	-	36 Orang											36 Orang				
1.2	II.1.1.a	II.1.1.a.1 II.1.1.a.2	2.08.2.02.01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	80.05%	76.75%	132,500	76.79%	270,325	77.46%	441,671	77.91%	304,574	78.39%	304,576	78.92%	304,577	78.92%	1,758,223		
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun	21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		
			2.08.2.02.01.15.03	Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan komplikasi dan kegagalan		5 Orang	15,000	5 Orang	16,000	5 Orang	77,506	5 Orang	77,506	5 Orang	77,508	5 Orang	77,509	30 Orang	341,029	Kota Pas.	
					Jumlah akseptor yang tes sperma		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		30 Orang			
					Jumlah akseptor yang tes papsnear		34 Orang		68 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		582 Orang			
			2.08.2.02.01.15.08	Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK	-	-	-	70 Orang	28,325	69 Orang	49,916	69 Orang	49,916	69 Orang	49,916	69 Orang	49,916	276 Orang	199,664		
			2.08.2.02.01.15.09	Kegiatan Gebyar Tentara Manunggal KB-Kesehatan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Gebyar TNI Manunggal KB Kesehatan	275 Orang	300 Orang	15,000	200 Orang	36,000	260 Orang	89,152	260 Orang	89,152	260 Orang	89,152	260 Orang	89,152	1.540 Orang	407,608	Keg. SPM Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.15.11	Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	70 Orang	46 Orang	20,000	50 Orang	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	96 Orang	37,000	Keg. SPM Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.15.12	Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana	Jumlah data Kepala Keluarga yang dimutakhirkan	-	-	-	2000 KK	88,000	8060 KK	88,000	8060 KK	88,000	8060 KK	88,000	8060 KK	88,000	32240 KK	352,000		
					Jumlah faskes KB yang melaporkan pelayanan KB	-	-	-	43 Faskes KB		43 Faskes KB		43 Faskes KB		43 Faskes KB		43 Faskes KB		172 Faskes KB			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			2.08.2.02.01.15.14	Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan rapat pembinaan keluarga sejahtera	250 Orang	180 Orang	20,000	185 Orang	21,000	-	-	-	-	-	-	-	365 Orang	41,000		Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.15.15	Kegiatan Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan teknis KIE	45 Orang	28 Orang	17,500	51 Orang	18,000	-	-	-	-	-	-	-	79 Orang	35,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.15.16	Kegiatan Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader	Jumlah orang yang mengikuti orientasi pengelola program KB bagi Kader	-	35 Orang	27,500	30 Orang	28,000	102 Orang	65,044	-	-	-	-	-	172 Orang	120,544	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.15.17	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB	Jumlah orang yang mengikuti monitoring dan evaluasi kinerja program KB	-	68 Orang	17,500	70 Orang	18,000	70 Orang	72,053	-	-	-	-	-	208 Orang	107,553	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			37,500	26.30%	15,000							26.30%	52,500				
			2.08.2.02.01.17.02	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kontrasepsi KB metode MOP, IUD dan Implant di Mobil Pelayanan KB	175 Orang	195 Orang	37,500	73 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	268 Orang	52,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR	Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif			169,500	71.43%	72,400							10 Kali	241,900				
			2.08.2.02.01.20.03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB Melalui Mobil Penerangan KB	Jumlah frekuensi penyebarluasan informasi program PP dan KB melalui pemutaran film dan pemberian informasi ke masyarakat dengan MUPEN	17 Kali	7 Kali	12,500	8 Kali	13,000	-	-	-	-	-	-	-	15 Kali	25,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah video film dokumetasi tentang kegiatan penyebarluasan informasi program PP dan KB yang dibuat	-	3 Buah		2 Buah									5 Buah				
			2.08.2.02.01.20.05	Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada kelompok PIK Remaja/Mahasiswa	54 Orang	50 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	15,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.20.06	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi kegiatan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa	-	19 Kelompok	19,500	20 Kelompok	25,000	-	-	-	-	-	-	-	39 Kelompok	19,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.20.07	Kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah orang yang mengikuti jambore PIK remaja/mahasiswa	-	100 Orang	30,000	100 Orang	10,000	-	-	-	-	-	-	-	200 Orang	30,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.20.08	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Genre	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti lomba Genre	-	27 Kelompok	15,000	27 Kelompok	24,400	-	-	-	-	-	-	-	54 Kelompok	39,400	Keg. SPM	Kota Pas.	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)	
			2.08.2.02.01.20.09	Kegiatan Orientasi Pengelola Genre Bagi Kelompok BKR	Jumlah orang yang mengikuti orientasi pengelola Genre bagi Kelompok BKR	-	40 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Orang	15,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.20.10	Kegiatan Pembuatan Seragam PIK-R dan Forum Anak	Jumlah seragam PIK-R yang disediakan	-	220 Seragam	62,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 Seragam	62,500	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah seragam forum anak yang disediakan	-	179 Seragam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 Seragam	-	-	-
			2.08.2.02.01.20.11	Kegiatan Sosialisasi Program Generasi Berencana Bagi Siswa SLTP	Jumlah orang siswa SLTP yang mendapatkan sosialisasi program Genre	-	-	-	75 Orang	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75Orang	20,000	Keg. SPM		
			2.08.2.02.01.25	Program Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB	Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana	-	53%	561,908	19.76%	548,760	-	-	-	-	-	-	-	-	19.76%	1,110,668	-	-	
					Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana	-	0%	-	18.60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.60%	-	-	-
			2.08.2.02.01.25.01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana Pelugas Lapangan KB	-	-	561,908	75 Set	548,760	-	-	-	-	-	-	-	-	252 Kader	1,110,668	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah sarana prasarana klinik pelayanan KB	-	-	-	15 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 Unit	-	-	-
					Jumlah sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	-	-	-	65 Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	-	-	-
			2.08.2.02.01.25.02	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional	-	-	-	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	16 Balai	1,344,400	-	-	
			2.08.2.02.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase kader PPKBK dan Sub PPKBK yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat	100%	100%	218,875	100%	277,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	495,875	-	-	
			2.08.2.02.01.18.01	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB	Jumlah orang yang mengikuti rapat pembinaan kelompok masyarakat mitra program KB	73 Orang	140 Orang	25,000	140 Orang	28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	280 Orang	53,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
					Jumlah orang pelugas pusyan gatra yang mendapat honorarium	-	4 Orang	-	4 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Orang	-	-	-
			2.08.2.02.01.18.03	Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah orang kader yang mengikuti pelatihan mengelola kelompok UPPKS	-	-	-	60 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Orang	15,000	Keg. SPM		
			2.08.2.02.01.18.04	Kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UPPKS	Jumlah kader UPPKS yang mengikuti sosialisasi akses permodalan	-	-	-	60 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Orang	15,000	Keg. SPM		
			2.08.2.02.01.18.08	Kegiatan Roadshow Hari Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti roadshow hari keluarga	-	150 Orang	12,500	150 Orang	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Orang	32,500	-	Kota Pas.	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg-SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			2.08.2.02.01.18.10	Kegiatan Gelar Produk UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti Gelar Produk pada event pameran	30 Kelompok	30 Kelompok	12,500	40 Kelompok	16,500	-	-	-	-	-	-	-	70 Kelompok	29,000	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.18.14	Kegiatan Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Jumlah orang yang mendapat honorarium PPKBK dan sub PPKBK	329 Orang	329 Orang	147,205	329 Orang	160,500	329 Orang	357,133	329 Orang	357,133	329 Orang	357,133	329 Orang	357,133	1974 Orang	1,736,237	Keg. SPM	Kota Pas.
					Jumlah orang yang mengikuti rapat evaluasi PPKBK dan sub PPKBK	-	330 Orang		330 Orang		340 Orang								1000 Orang			
			2.08.2.02.01.18.18	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba KB/KS	Jumlah orang yang melaksanakan lomba KB/KS tingkat kota	36 Orang	36 Orang	21,670	56 Orang	22,000	-	-	-	-	-	-	-	92 Orang	43,670	Keg. SPM	Kota Pas.	
			2.08.2.02.01.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif			272,186	82 Kelompok	182,000	-	-	-	-	-	-	-	90 Kelompok	454,185.5			
			2.08.2.02.01.23.04	Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS dan Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana	Jumlah data KB/KS dan data KB dari Klinik KB yang tervalidasi		2.500 KK	87,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5010 KK	87,500	Keg. SPM		
			2.08.2.02.01.23.05	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kader Bina Keluarga Balita	80 Orang	40 Orang	15,000	90 Orang	16,000	-	-	-	-	-	-	-	130 Orang	31,000	Keg. SPM		
			2.08.2.02.01.23.06	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah orang yang mendapat fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan hibah	-	34 Orang	9,686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 Orang	9,686			
			2.08.2.02.01.23.10	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tri Bina	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi rapat kelompok tribina	-	3.000 Peserta	115,000	3.030 Peserta	116,000	-	-	-	-	-	-	-	6030 Peserta	231,000	Keg. SPM		
			2.08.2.02.01.23.11	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kader Bina Keluarga Remaja	-	40 Orang	15,000	40 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	80 Orang	30,000			
			2.08.2.02.01.23.12	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kader Bina Keluarga Lansia	40	40 Orang	15,000	80 Orang	20,000	-	-	-	-	-	-	-	120 Orang	35,000			
			2.08.2.02.01.23.13	Kegiatan Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan pendidikan parenting bagi kelompok BKR	-	41 Orang	15,000	40 Orang	15,000	-	-	-	-	-	-	-	81Orang	30,000			
			2.07.2.02.01.18	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang berprestasi di Tingkat Kota, Propinsi / Nasional	-	-	-	1 Kelurahan	756,800	-	-	-	-	-	-	-	4 Kelurahan	756,800			
					Persentase mitra program yang aktif				50%													
			2.07.2.02.01.18.06	Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat & Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan BBGRM	-	-	-	34 Kelurahan	300,000	-	-	-	-	-	-	-	34 Kelurahan	300,000			
			2.07.2.02.01.18.10	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sejahtera	Jumlah masyarakat yang paham gerakan pemberdayaan dan keluarga sejahtera	-	-	-	1020 Orang	456,800	-	-	-	-	-	-	-	1020 Orang	456,800			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg. SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
SETELAH PERUBAHAN II																						
1.1	1.1.1.a	1.1.1.a.1	2.08.2.02.01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	80.05%	76.75%	75,000	77.79%	89,000	77.46%		77.91%		78.39%		78.92%		78.92%	164,000		
					Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana						20.06%		20.06%		20.06%		20.06%		20.06%			
					Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana						18.60%		20.93%		20.93%		20.93%		20.93%			
			2.08.2.02.01.15.03	Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan komplikasi dan kegagalan		5 Orang	15,000	5 Orang	20,000	5 Orang	61,885	5 Orang	68,000	5 Orang	69,500	5 Orang	70,500	30 Orang	304,885		Kota Pas.
					Jumlah akseptor yang tes sperma		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		30 Orang			
					Jumlah akseptor yang tes papsmeear		34 Orang		68 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		582 Orang			
			2.08.2.02.01.15.08	Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK	-	-	-	-	-	69 Orang	39,016	69 Orang	42,900	69 Orang	43,500	69 Orang	44,000	276 Orang	169,416		
			2.08.2.02.01.15.09	Kegiatan Gebyar Tentara Manunggal KB-Kesehatan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Gebyar TNI Manunggal KB Kesehatan	275 Orang	300 Orang	15,000	300 Orang	18,000	260 Orang	14,244	260 Orang	36,000	260 Orang	36,000	260 Orang	36,000	1.640 Orang	155,244	Keg. SPM	Kota Pas.
			2.08.2.02.01.15.12	Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana	Jumlah data Kepala Keluarga yang dimutakhirkan	-	-	-	-	-	2000 KK	34,000	2000 KK	37,400	2000 KK	38,000	2000 KK	88,000	8000 KK	197,400		
					Jumlah faskes KB yang melaporkan pelayanan KB	-	-	-	-	-	43 Faskes KB		43 Faskes KB		43 Faskes KB		43 Faskes KB		172 Faskes KB			
			2.08.2.02.01.15.16	Kegiatan Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader	Jumlah orang yang mengikuti orientasi pengelola program KB bagi Kader	-	35 Orang	27,500	35 Orang	29,000	102 Orang	42,895	102 Orang	47,150	102 Orang	49,000	102 Orang	50,000	478 Orang	245,545	Keg. SPM	Kota Pas.
			2.08.2.02.01.15.17	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB	Jumlah orang yang mengikuti monitoring dan evaluasi kinerja program KB	-	68 Orang	17,500	70 Orang	22,000	70 Orang	30,000	70 Orang	33,000	70 Orang	33,000	70 Orang	35,000	418 Orang	170,500	Keg. SPM	Kota Pas.
			2.08.2.02.01.15.18	Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kota	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan rapat pembinaan keluarga sejahtera	-	-	-	-	-	150 Orang	43,877	150 Orang	48,250	150 Orang	49,000	150 Orang	49,500	600 orang	190,627		
					Jumlah orang yang mengikuti roadshow hari keluarga	-	-	-	-	-	70 Orang		70 Orang		70 Orang		70 Orang		280 orang			
			2.08.2.02.01.15.xx	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kontrasepsi KB metode MOP, IUD, dan Implant di Mobil Pelayanan KB	-	-	-	-	-	120 Orang	65,000	120 Orang	71,500	120 Orang	72,000	120 Orang	75,000	480 orang	283,500		
			2.08.2.02.01.15.xx	Sosialisasi Program KB bagi PUS Unmetneed	Jumlah PUS belum ikut KB yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	-	-	200 Orang	69,678	200 Orang	76,600	200 Orang	77,000	200 Orang	79,000	800 orang	302,278		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg.SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			2.08.2.02.02.15.xx	Fasilitasi partisipasi HARGANAS (Tingkat Propinsi dan Nasional)	Jumlah orang yang mengikuti Harganas	-	-	-	-	-	20 Orang	69,900	20 Orang	76,890	20 Orang	77,000	20 Orang	79,000	80 orang	302,790		
			2.08.2.02.01.15.xx	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana kerja Sub PPKBK	-	-	-	-	-	79 Unit	421,770	15 Unit	300,000					94 Unit	721,770		
					Jumlah sarana prasarana klinik pelayanan KB	-	-	-	-	-	30 Set		30 Set						60 Set			
					Jumlah media advokasi dan KIE	-	-	-	-	-	15 Set		15 Set						30 Set			
			2.08.2.02.01.15.xx	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional	-	-	-	-	-	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	4 Balai	336,100	16 Balai	1,344,400		
			2.08.2.02.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase kader PPKBK dan Sub PPKBK yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri kepada masyarakat						100%		100%		100%		100%		100%			
					Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif						73.16%		75.27%		75.82%		76.16%		76.16%			
					Median Usia Kawin Pertama Perempuan						21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		21 Tahun			
			1.12.1.11.1.18.14	Kegiatan Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Jumlah orang kader yang mendapat honorarium	329 Orang	329 Orang	147,205	329 Orang	189,360	329 Orang	218,207	329 Orang	240,000	329 Orang	240,000	329 Orang	250,000	1974 Orang	1,284,772	Keg. SPM	Kota Pas.
					Jumlah orang yang mengikuti rapat evaluasi	-	330 Orang		330 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		1000 Orang			
			2.08.2.02.01.18.XX	Pelatihan Penggunaan Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan (ABPK) bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan ABPK	-	-	-	-	-	35 orang	49,893	35 orang	54,800	35 orang	55,000	35 orang	57,000	140 orang	216,693		
			2.08.2.02.01.18.xx	Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Penyuluh KB	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	-	-	-	-	-	40 Orang	35,000	40 Orang	38,500	40 Orang	39,000	40 Orang	40,500	160 orang	153,000		
			2.08.2.02.01.18.xx	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pendewasaan usia Perkawinan (PUP)	-	-	-	-	-	70 orang	69,000	70 orang	75,900	70 orang	76,500	70 orang	78,000	280 orang	299,400		
			2.08.2.02.01.18.xx	Pembinaan kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi kegiatan kelompok PIK	-	-	-	-	-	20 kelompok	76,850	20 kelompok	84,500	24 kelompok	85,500	28 kelompok	87,000	92 kelompok	333,850		
					Jumlah Kelompok yang mengikuti Pembinaan PIK Remaja	-	-	-	-	-	30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		120 kelompok			
			2.08.2.02.01.18.xx	Sosialisasi Program Generasi Berencana bagi siswa SLTP dan SLTA	Jumlah orang siswa SLTP dan SLTA yang mendapatkan sosialisasi program Genre	-	-	-	-	-	120 Orang	35,000	120 Orang	38,500	120 Orang	39,000	120 Orang	40,000	480 orang	152,500		
			2.08.2.02.01.18.xx	Penyelenggaraan Lomba GenRe	Jumlah kelompok PIK-R/M yang mengikuti lomba GenRe	-	-	-	-	-	4 Kelompok	29,008	4 Kelompok	31,900	4 Kelompok	32,000	4 Kelompok	33,000	16 kelompok	125,908		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg.SPM	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)					
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)		
			2.08.2.02.01.18.xx	Penyebarluasan Informasi program PP,PA dan KB melalui Mobil Penerangan KB	Jumlah frekuensi penyebarluasan informasi melalui pemutaran film dengan Mupen	-	-	-	-	8 Kali	24,756	8 Kali	27,250	8 Kali	28,000	8 Kali	29,500	32 Kali	109,506					
			2.08.2.02.01.18.xx	Pelatihan Kounselor Sebaya dan Pendidik Sebaya bagi Pengurus PIK - Remaja/Mahasiswa	Jumlah Kounselor Sebaya dan Pendidik Sebaya dari PIK-Remaja/Mahasiswa yang mendapat Pelatihan	-	-	-	-	40 Orang	38,000	40 Orang	41,800	40 Orang	43,000	40 Orang	45,000	160 orang	167,800					
II.1	II.1.1.a	II.1.1.a.1 II.1.1.a.2 II.1.1.a.3	2.02.2.02.01.xx	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	-	-	-	-	51.40%	51.50%		51.50%		51.61%		51.61%		51.61%					
							Persentase perempuan dalam dunia usaha	-	-	-	-	14.51%	14.57%		14.63%		14.70%		14.70%		14.70%			
							Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani	-	-	-	-	100%	100%		100%		100%		100.00%		100.00%			
			2.02.2.02.01.xx.xx	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	-	-	-	-	300 Orang	47,624	300 Orang	50,000	300 Orang	50,000	300 Orang	50,000	300 Orang	50,000	1200 orang	197,624			
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pelatihan Dasar Penanganan Kasus PPT Perlindungan Perempuan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	50 Orang	64,000	50 Orang	70,000	50 Orang	70,000	50 Orang	70,000	50 Orang	70,000	200 orang	274,000			
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah kader GSI yang mendapat pembinaan	-	-	-	-	250 Orang	32,000	250 Orang	35,000	250 Orang	35,000	250 Orang	35,000	250 Orang	35,000	1000 orang	137,000			
			2.02.2.02.01.xx.xx	Sosialisasi Mekanisme Penanganan Tindak Kekerasan Bagi Perempuan	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	-	-	-	-	554 Orang	57,000	554 Orang	62,700	554 Orang	75,000	554 Orang	75,000	554 Orang	75,000	2216 orang	269,700			
			2.02.2.02.01.xx.xx	Penyebaran Informasi Program Pemberdayaan Perempuan	Jumlah media/sarana penyebaran informasi yang dibuat	-	-	-	-	3 media	36,500	3 media	40,000	3 media	45,000	3 media	56,500	12 media	178,000					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapat pelatihan	-	-	-	-	300 Orang	76,000	300 Orang	83,600	300 Orang	90,000	300 Orang	100,000	1.200 orang	349,600					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan	Jumlah orang yang mendapat pembinaan manajemen	-	-	-	-	120 Orang	37,000	120 Orang	40,000	120 Orang	40,000	120 Orang	40,000	480 orang	157,000					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pemutakhiran Profil Gender	Jumlah buku Profil Gender yang dicetak	-	-	-	-	50 Buku	66,500	50 Buku	73,150	50 Buku	80,000	50 Buku	85,000	200 buku	304,650					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pembinaan P2WKSS	Jumlah orang yang mendapat pembinaan peningkatan emansipasi wanita	-	-	-	-	1.400 Orang	190,000	1.400 Orang	179,000	1.400 Orang	200,000	1.400 Orang	200,000	5600 orang	769,000					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba pembinaan kader teladan dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	-	-	-	-	400 Peserta	67,877	400 Peserta	67,877	400 Peserta	70,000	400 Peserta	70,000	1600 peserta	275,753					
2.02.2.02.01.xx.xx	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi	-	-	-	-	120 Orang	30,000	120 Orang	33,000	120 Orang	36,000	120 Orang	40,000	480 orang	139,000								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg./SPM	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)				
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)	
			2.02.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Jumlah orang yang mengikuti pertemuan dalam rangka pelaksanaan APE	-	-	-	-	-	4 Kali	88,000	4 Kali	96,800	4 Kali	98,000	4 Kali	100,000	16 Kali	382,800			
	II.1.2.a	II.1.2.a.1	2.02.2.02.01.xx	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%				
					Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan	-	-	-	-	-	90%		90%		100%		100%		100%				
					Persentase Forum Anak yang aktif	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%				
					Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan hak anak	-	-	-	-	-	90%		100%		100%		100%		100%				
			2.02.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Pelayanan Perlindungan Anak	Jumlah tenaga sekretariat PPT-PPA	-	-	-	-	15 Orang	128,000	15 Orang	140,800	15 Orang	142,000	15 Orang	145,000	60 orang	555,800				
					Jumlah kasus anak yang mendapat pendampingan	-	-	-	-	100 Kasus		100 Kasus		100 Kasus		100 Kasus		400 kasus					
					Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi PPT-PPA dan lintas sektor	-	-	-	-	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		200 orang					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Forum Anak Kota Pasuruan	Jumlah sekretariat forum anak yang mendapat fasilitasi operasional	-	-	-	-	39 forum anak	107,000	39 forum anak	117,700	39 forum anak	122,700	39 forum anak	127,700	156 forum anak	475,100				
					Jumlah frekuensi pertemuan forum anak	-	-	-	-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		48 kali					
					Jumlah orang yang mengikuti pertemuan forum anak setiap bulan	-	-	-	-	610 Orang		610 Orang		610 Orang		610 Orang		2440 orang					
					Jumlah kegiatan advokasi yang dilaksanakan forum anak	-	-	-	-	5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		20 kegiatan					
			2.02.2.02.01.xx.xx	Sosialisasi Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi anak berhadapan dengan hukum	-	-	-	-	120 Orang	46,000	120 Orang	50,600	120 Orang	53,000	120 Orang	56,000	480 orang	205,600				
			2.02.2.02.01.xx.xx	Profil Anak Kota Pasuruan	Jumlah SKPD yang terkait dalam penyusunan data terpilih sesuai dengan 5 Kluster dan 31 Indikator sesuai kondisi anak Kota Pasuruan	-	-	-	-	35 SKPD	62,666	35 SKPD	68,900	35 SKPD	71,500	35 SKPD	73,000	140 SKPD	276,066				
			2.02.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Kota Layak Anak	Jumlah Tim Advokasi dan Gugus Tugas KLA dari 5 Kluster dan 31 Indikator yang mendapat fasilitasi KLA	-	-	-	-	77 Orang	165,000	77 Orang	167,000	77 Orang	169,000	77 Orang	171,000	308 orang	672,000				
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Jumlah orang yang mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak (PUHA)	-	-	-	-	100 orang	65,000	100 orang	71,500	100 orang	72,500	100 orang	73,500	400 orang	282,500				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg.SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			2.02.2.02.01.xx.xx	Pelatihan Dasar Kepemimpinan Anak	Jumlah anak yang mendapat pelatihan dasar kepemimpinan anak (LDKA) dan meringkat wawasannya dalam kepemimpinan, etika (moral) dan cara mengadvokasi teman sebaya	-	-	-	-	-	150 anak	75,000	150 anak	75,000	150 anak	75,000	150 anak	75,000	600 anak	300,000		
			2.02.2.02.01.xx.xx	Lomba Cerdas Cermat Kota Layak Anak	Jumlah peserta lomba cerdas cermat KLA	-	-	-	-	-	38 kelompok	45,500	38 kelompok	50,000	38 kelompok	52,500	38 kelompok	55,000	152 kelompok	203,000		
			2.02.2.02.01.xx.xx	Gebyar Forum Anak Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Gebyar Forum Anak Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	1000 orang	125,000	1000 orang	138,600	1000 orang	139,500	1000 orang	142,000	4000 orang	545,100		
			2.02.2.02.01.xx.xx	Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak	Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi KLA	-	-	-	-	-	2 Kali	36,500	2 Kali	40,150	2 Kali	42,000	2 Kali	43,500	8 kali	162,150		
					Jumlah SKPD terkait pelaksanaan KLA yang mengikuti monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	-	35 SKPD		35 SKPD		35 SKPD		35 SKPD		140 SKPD			
II.2	II.2.1.a	II.2.1.a.1	2.08.2.02.01.xx	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang aktif	-	-	-	-	-	99 Kelompok		116 Kelompok		133 Kelompok		147 Kelompok		147 kelompok			
					Persentase Mitra Program yang aktif	-	-	-	-	-	60%		80%		80%		100%		100%			
			2.08.2.02.01.xx.xx	Penyelenggaraan lomba KB/KS	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba	-	-	-	-	-	24 kelompok	56,000	24 kelompok	61,600	24 kelompok	62,500	24 kelompok	63,000	96 kelompok	243,100		
					Jumlah jenis lomba yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis			
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB	Jumlah kelompok masyarakat mitra program KB yang mendapat fasilitasi	-	-	-	-	-	6 Kelp.	18,000	6 Kelp.	19,800	6 Kelp.	21,000	6 Kelp.	22,000	24 kelp.	80,800		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Kelompok Tribina	Jumlah kelompok BKB yang mendapat fasilitasi	-	-	-	-	-	85 Kelp.	146,000	85 Kelp.	160,600	85 Kelp.	160,600	85 Kelp.	160,600	340 Kelp	627,800		
					Jumlah kelompok BKR yang mendapat fasilitasi	-	-	-	-	-	20 Kelp.		20 Kelp.		20 Kelp.		20 Kelp.		60 kelp			
					Jumlah kelompok BKL yang mendapat fasilitasi	-	-	-	-	-	42 Kelp.		42 Kelp.		42 Kelp.		42 Kelp.		168 kelp			
			2.08.2.02.01.xx.xx	Pelatihan Kader Tribina	Jumlah kader BKB yg ikut pelatihan	-	-	-	-	-	90 orang	94,000	90 orang	103,400	90 orang	105,000	90 orang	107,500	360 orang	409,900		
					jumlah kader BKR yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		160 orang			
					Jumlah kader BKL yang mengikuti Pelatihan	-	-	-	-	-	84 orang		84 orang		84 orang		84 orang		336 orang			
			2.08.2.02.01.xx.xx	Updating Data Kelompok Tribina	Jumlah data kelompok Tribina yang diupdate	-	-	-	-	-	152 Kelp	26,000	152 Kelp	28,600	152 Kelp	29,300	152 Kelp	31,000	608 kelp	114,900		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang mendapat fasilitasi	-	-	-	-	-	2 Pusat Pelayanan	58,000	2 Pusat Pelayanan	63,800	2 Pusat Pelayanan	65,000	2 Pusat Pelayanan	68,000	8 Pusat pelayanan	254,800		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan keluarga sejahtera	Jumlah Pokja PKK dan bidang yang difasilitasi	-	-	-	-	-	5 Pokja 1 Bidang	300,000	5 Pokja 1 Bidang	450,000	5 Pokja 1 Bidang	450,000	5 Pokja 1 Bidang	450,000	20 Pokja 1 Bidang	1,650,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Ind./Keg-SPM	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kinerja akhir (2021)			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														(9)	(10)
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	-	-	-	-	-	50 kelompok	36,500	50 kelompok	40,150	50 kelompok	43,000	50 kelompok	45,000	200 kelompok	164,650		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Gelar produk UPPKS	Jumlah kader UPPKS yang mengikuti pameran gelar produk	-	-	-	-	-	40 kelompok	73,500	40 kelompok	80,850	40 kelompok	81,000	40 kelompok	82,500	160 kelompok	317,850		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Updating Data Kelompok UPPKS	Jumlah data kelompok UPPKS yang diupdate	-	-	-	-	-	136 kelompok	20,000	136 kelompok	22,000	136 kelompok	25,000	136 kelompok	30,000	544 kelompok	97,000		
			2.08.2.02.01.xx	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelurahan yang berprestasi di Tingkat Kota, Propinsi / Nasional	-	-	-	-	-	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		4 Kelurahan			
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota / Propinsi / Nasional	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	4 kelurahan	72,500	4 kelurahan	79,750	4 kelurahan	81,000	4 kelurahan	82,500	16 Kelurahan	315,750		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	34 Kelompok	48,000	34 Kelompok	40,700	34 Kelompok	42,000	34 Kelompok	45,000	136 Kelompok	175,700		
			2.08.2.02.01.xx.xx	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dan HKG-PKK	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan BBGRM	-	-	-	-	-	34 Kelurahan	320,000	34 Kelurahan	352,000	34 Kelurahan	365,000	34 Kelurahan	480,000	136 Kelurahan	1,517,000		

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada kepala daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib. Bidang-bidang SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri dari 15 bidang yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Sosial
5. Bidang Tenaga Kerja
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
8. Bidang Ketahanan Pangan
9. Bidang Kesenian
10. Bidang Penanaman Modal
11. Bidang Komunikasi dan Informatika
12. Bidang Perhubungan
13. Bidang Perumahan Rakyat
14. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Bidang Lingkungan Hidup

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan 2

(dua) bidang SPM yakni bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Indikator SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri dari :

- a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th 3.5%;
- b. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 65%;
- c. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%;
- d. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%;
- e. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%;
- f. Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;
- g. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan;
- h. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun;
- i. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun;

Sedangkan indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat diakomodir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan adalah Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Rincian target indikator SPM dan program/kegiatan pendukungnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditemukan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga sebenarnya tidak mempunyai SPM.

Tabel 5.2
Pemetaan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Program/Kegiatan Pendukungnya
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
Tahun 2016-2021

No	Indikator SPM / Program-Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
A	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th 3.5%	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Keluarga Berencana	Rp. Juta	20,000	30,000	35,000	40,000	50,000	50,000
1	Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Rp. Juta	20,000	30,000	35,000	40,000	50,000	50,000
II	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp. Juta	157,000	82,000	135,000	110,000	126,000	185,000
2	Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja	Rp. Juta	15,000	-	40,000	-	-	40,000
3	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Rp. Juta	19,500	25,000	28,000	32,000	36,000	40,000
4	Kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	Rp. Juta	30,000	37,000	42,000	48,000	55,000	55,000
5	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba GenRe	Rp. Juta	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	35,000
6	Kegiatan Orientasi GenRe Bagi Kelompok BKR	Rp. Juta	15,000	-	-	-	-	15,000
7	Kegiatan Pembuatan Seragam PIK-R dan Forum Anak	Rp. Juta	62,500	-	-	-	-	-
8	Sosialisasi Program Generasi Berencana Bagi Siswa SLTP	Rp. Juta	-	45,000	-	-	-	45,000
9	Pelatihan Manajemen Pusat Informasi dan Konseling (PIK)	Rp. Juta	-	-	-	40,000	-	-
10	Sosialisasi Program Generasi Berencana Bagi Pondok Pesantren	Rp. Juta	-	-	-	-	74,000	-
B	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 65%	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp. Juta	37,500	7,500	6,000	3,600	-	-
1	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Rp. Juta	37,500	7,500	6,000	3,600	-	-
II	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp. Juta	12,500	18,000	20,000	24,000	25,000	25,000
2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Melalui Mobil Penerangan KB	Rp. Juta	12,500	18,000	20,000	24,000	25,000	25,000
III	Program Keluarga Berencana	Rp. Juta	60,000	69,000	76,000	83,500	90,000	90,000
3	Kegiatan Gebyar Tentara Manunggal Kesehatan	Rp. Juta	15,000	18,000	20,000	23,000	25,000	25,000
4	Kegiatan Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader	Rp. Juta	27,500	29,000	31,000	33,000	35,000	35,000
5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB	Rp. Juta	17,500	22,000	25,000	27,500	30,000	30,000
IV	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. Juta	20,000	20,000	22,000	24,000	26,000	26,000
6	Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan	Rp. Juta	20,000	20,000	22,000	24,000	26,000	26,000
C	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	%	60	70	80	90	100	100
III	Program Keluarga Berencana	Rp. Juta	17,500	30,000	35,000	40,000	50,000	50,000

No	Indikator SPM / Program-Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kegiatan Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Rp. Juta	17,500	30,000	35,000	40,000	50,000	50,000
D	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp. Juta	130,000	225,000	237,500	230,000	250,000	250,000
1	Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita	Rp. Juta	15,000	25,000	27,500	30,000	35,000	35,000
2	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tri Bina	Rp. Juta	115,000	200,000	210,000	200,000	215,000	215,000
II	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. Juta	21,670	25,000	27,800	32,100	34,300	34,300
3	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba KB/KS	Rp. Juta	21,670	25,000	27,800	32,100	34,300	34,300
E	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial	Rp. Juta	8,500	-	-	-	-	-
1	Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Rp. Juta	8,500	-	-	-	-	-
II	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. Juta	12,500	30,000	35,000	35,000	50,000	50,000
2	Kegiatan Gelar Produk UPPKS	Rp. Juta	12,500	30,000	35,000	35,000	50,000	50,000
3	Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Rp. Juta	-	15,000	20,000	25,000	25,000	25,000
4	Kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UPPKS	Rp. Juta	-	15,000	18,000	-	-	-
F	Ratio Petugas lapangan KB/ Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. Juta	25,000	28,000	30,000	35,000	40,000	40,000
1	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB	Rp. Juta	25,000	28,000	30,000	35,000	40,000	40,000
G	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. Juta	147,205	189,360	192,000	203,000	207,500	207,500
1	Kegiatan Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK	Rp. Juta	147,205	189,360	192,000	203,000	207,500	207,500
H	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB	Rp. Juta	561,908	400,000	400,000	-	-	-
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Rp. Juta	561,907.8	400,000	400,000	-	-	-
I	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp. Juta	87,500	168,000	170,000	175,000	180,000	180,000
1	Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS dan Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana	Rp. Juta	87,500	168,000	170,000	175,000	180,000	180,000
	SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan							

No	Indikator SPM / Program-Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	100
I	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. Juta	36,000	44,000	46,000	48,000	48,000	48,000
1	Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak	Rp. Juta	36,000	44,000	46,000	48,000	48,000	48,000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PASURUAN 2016-2021

Untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD maka perlu adanya penetapan indikator kinerja. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021.

Dalam penetapan indikator kinerja tahun 2016-2021 perlu memperhatikan realisasi capaian indikator kinerja tahun lima tahun sebelumnya (2011-2015). Realisasi capaian kinerja tahun 2011-2015 dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2016-2021 lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 6.1.

Perumusan indikator kinerja harus didahului dengan pemetaan tujuan, sasaran jangka menengah dan program SKPD, selanjutnya disusun target tahunan untuk setiap indikator.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan. Secara lebih lengkap mengenai arsitektur kebijakan beserta indikator kinerjanya dari Misi Walikota Pasuruan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, indikator dan target kinerjanya tahun 2016-2021, serta rencana program dan kegiatan disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2021

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Misi Pembangunan Kota Pasuruan										
I	Misi II : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tujuan Pembangunan Kota Pasuruan										
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan									
	Sasaran Pembangunan Kota Pasuruan										
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	angka harapan hidup									
	Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana										
1	Meningkatkan kepedulian masyarakat ber-Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	Indeks	2.11	2.1	2.09	2.07	2.06	2.05	2.04	
	Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana										

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	Indeks	2.11	2.1	2.09	2.07	2.06	2.05	2.04	Program Keluarga Berencana
											Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi
											Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK
											Kegiatan Gebyar Tentara Manunggal KB-Kesehatan
											Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana
											Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga (Tingkat II)
											Kegiatan Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader
											Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB
											Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
											Sosialisasi Program KB bagi PUS Unmetneed
											Fasilitasi HARGANAS (Tingkat Propinsi dan Nasional)
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB MOW dan MOP Interval Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB Melalui Mobil Penerangan KB Kegiatan Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Genre
											Kegiatan Orientasi Pengelola Genre Bagi Kelompok BKR
											Kegiatan Pembuatan Seragam PIK-R dan Forum Anak
											Kegiatan Sosialisasi Program Generasi Berencana Bagi Siswa SLTP
											Kegiatan Pelatihan Manajemen Pusat Informasi dan Konseling (PIK)
											Sosialisasi Program Generasi Berencana Bagi Pondok Pesantren
											Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
											Pembinaan kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja
											Sosialisasi Program Generasi Berencana bagi siswa SLTP dan SLTA
											Penyelenggaraan Lomba GenRe

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Program Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Penyediaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB Kegiatan Roadshow Hari Keluarga Kegiatan Gelar Produk UPPKS Kegiatan Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK Kegiatan Penyelenggaraan Lomba KB/KS Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan Bagi UPPKS
											Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas)
											Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Penyuluh KB
											Rapat Koordinasi Pengelolaan Program KB
											Pelatihan Penggunaan Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan (ABPK) bagi PPKBK dan Sub PPKBK
											Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan bagi Penyuluh KB
											Jambore PIK Remaja/Mahasiswa
											Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
											Pembinaan kelompok pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana										
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96.30	96.39	96.48	96.57	96.65	96.74	96.83	
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	53.53	-	54.82	55.48	56.15	56.82	57.50	
		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	-5.88	-	5.56	5.88	6.25	6.67	7.14	
		Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	-	-	750	800	850	900	1000	
2	Meningkatkan peran serta keluarga dalam pembangunan	Persentase Keluarga Sejahtera I	%	33.35	-	33.24	33.16	32.97	32.78	32.59	
	Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana										
1	Meningkatnya perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96.30	96.39	96.48	96.57	96.65	96.74	96.83	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	53.53	-	54.82	55.48	56.15	56.82	57.50	Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan
		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	-5.88	-	5.56	5.88	6.25	6.67	7.14	Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi
											Kegiatan Revitalisasi Pokja PUG

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender
											Kegiatan Penyusunan Profil Gender
											Kegiatan Lomba P2WKSS
											Kegiatan Fasilitasi GOW
											Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
											Kegiatan Sosialisasi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)
											Kegiatan Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender
											Kegiatan Fasilitasi APE (Anugerah Parahita Ekapraya)
											Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
											Kegiatan Pemutakhiran Profil Gender
											Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak Kegiatan Lomba P2WKSS Kegiatan Pembinaan P2WKSS Kegiatan Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kegiatan Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pelatihan Dasar Penanganan Kasus Perlindungan Perempuan Fasilitasi Pelayanan Perlindungan Perempuan Sosialisasi Mekanisme/Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Perempuan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
											Pelatihan Dasar Penanganan Kasus PPT Perlindungan Perempuan
											Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)
											Sosialisasi Mekanisme Penanganan Tindak Kekerasan Bagi Perempuan
											Penyebaran Informasi Program Pemberdayaan Perempuan
											Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif
											Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan
											Pemutakhiran Profil Gender
											Pembinaan P2WKSS
											Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
											Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
											Fasilitasi APE (Anugerah Parahita Ekapraya)

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	-	-	750	800	850	900	1000	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) Kegiatan Verifikasi Kota Layak Anak Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Media KIE Kegiatan Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak) Kegiatan Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kegiatan Fasilitasi Forum Anak Kegiatan Penyusunan Profil Anak Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Fasilitasi Pelayanan Perlindungan Anak Fasilitasi Forum Anak Kota Pasuruan Sosialisasi Anak Berhadapan dengan Hukum Profil Anak Kota Pasuruan

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Fasilitasi Kota Layak Anak Pelatihan Konvensi Hak Anak (PUHA) Pelatihan Dasar Kepemimpinan Anak Lomba Cerdas Cermat Kota Layak Anak Gebyar Forum Anak Kota Pasuruan Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak
3	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Sejahtera I	%	33.35	-	33.24	33.16	32.97	32.78	32.59	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan Pemutakhiran Data KB/KS dan Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tri Bina Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja Kegiatan Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kegiatan Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR
											Program Peningkatan Ketahanan Keluarga
											Penyelenggaraan lomba KB/KS
											Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB
											Fasilitasi Kelompok Tribina
											Pelatihan Kader Tribina
											Updating Data Kelompok Tribina
											Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
											Fasilitasi pemberdayaan kelembagaan keluarga sejahtera
											Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS
											Gelar produk UPPKS
											Updating Data Kelompok UPPKS
											Program Pemberdayaan Masyarakat
											Fasilitasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota / Propinsi / Nasional

No	Arsitektur Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Kinerja						Program/Kegiatan
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat
											Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dan HKG-PKK
											Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial
											Kegiatan Fasilitasi Pendistribusian Raskin
											Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2016-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016–2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pasuruan



Hj. SUMARNI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580605 198303 2008

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN

1 Sasaran Strategis	2 Indikator Kinerja Utama	3 Metode/Formulasi Perhitungan	4 Sumber Data	5 Penanggung Jawab
1. Meningkatnya perlindungan dan peran serta perempuan dan masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$ Keterangan : IPM : Indeks Pembangunan Manusia	BPS	DPPPAKB
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 [Ipar + IDM + linc-dis]$ Keterangan : Ipar : Indeks keterwakilan di parlemen IDM : Indeks pengambilan keputusan linc-dis : Indeks distribusi pendapatan	BPS	DPPPAKB
	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun (n-1) - tahun (n)}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun (n-1)}} \times 100\%$	Unit PPA Polres Kota Pasuruan	DPPPAKB
2. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Capaian Indikator Kota Layak Anak	Total nilai dari 5 Kluster 24 Indikator Kota Layak Anak	Hasil Penilaian Kota Layak Anak	DPPPAKB
3. Meningkatnya Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ Keterangan : ASFR _i = angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok i i = 1 = kelompok umur 15-19 tahun, ... dan i = 7 untuk kelompok umur 45-49 tahun Sedangkan ASFR dapat dituliskan sbb : $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ b _i = jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p _i = jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i = 1 untuk perempuan kelompok umur 15-19 tahun, i = 7 untuk 45-49 tahun) k = bilangan konstanta biasanya 1000	BPS	DPPPAKB
4. Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Sejahtera I	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera I}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Keluarga	DPPPAKB